

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN *FRAUD***  
**PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Disusun oleh:

Pinanta Chairunnisa

142210135

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**  
**YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN *FRAUD***

**PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan  
Nasional “Veteran” Yogyakarta



Disusun oleh:

**PINANTA CHAIRUNNISA**  
NIM. 142210135

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**  
**YOGYAKARTA**

2025

## LEMBAR PENGESAHAN

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh:

**PINANTA CHAIRUNNISA**

NIM. 142210135

Telah disetujui dengan baik,

Yogyakarta, 19 Februari 2025



Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19730424 202121 2 002

Dr. H. Sutoyo, S.E., M.Si.

NIP. 19620101 199103 1 001

Lita Yulita Fitriyani, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19720729 202121 2 003

Sri Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19711020 202121 2 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta



Dr. Kusfaryanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19700402 202121 2 008

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh:

**PINANTA CHAIRUNNISA**

NIM. 142210135

Telah dipresentasikan di depan penguji pada tanggal 7 Februari 2025 dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta



Dr. Kusharyanti, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP. 19700402 202121 2 008

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinanta Chairunnisa

No. Mahasiswa 142210135

Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Yang memberikan pernyataan,



Pinanta Chairunnisa

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *e-procurement*, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, komitmen organisasi, integritas terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa publik. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui distribusi kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 107 responden yang mewakili 34 instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, *e-procurement* dan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

**Kata Kunci:** *E-Procurement, Pengadaan Barang dan Jasa, Pencegahan Fraud*

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the influence of e-procurement, internal control systems, whistleblowing systems, organizational commitment, and integrity on fraud prevention in public procurement of goods and services. The study uses primary data obtained through the distribution of questionnaires. The sample consists of 107 respondents representing 34 Yogyakarta City Government agencies. The data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS 27. The results of the study show that internal control systems, organizational commitment, and integrity have an effect on fraud prevention in the procurement of goods and services. Meanwhile, e-procurement and the whistleblowing system do not have an effect on fraud prevention in public procurement of goods and services.*

**Keywords:** *E-Procurement, Procurement, Fraud Prevention*

## **MOTTO**

“Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan, duniaku pernah hancur,  
rangkai lagi satu-satu”

**(IDGITAF)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa terdapat peran penting dari berbagai pihak dalam membimbing dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih penulis tujuhan kepada:

1. Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Aan dan Mamah Rina, yang selalu memberi dukungan berupa doa, materi, maupun kasih sayang yang tiada henti.
3. Pinandita Kinanthi Nafisha, adik saya yang selalu memberikan kebahagiaan.
4. Prof. Dr. Mohammad Irhas Effendi, M.Si., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5. Dr. Januar Eko Prasetio, M.Si., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

6. Dr. Kusharyati, M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
7. Sucahyo Heriningsih, M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis.
8. Dr. Noto Pamungkas, M.Si selaku Dosen Wali yang senantiasa membantu penulis dalam hal akademik.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
10. Puanku Pijar Maharani selaku sahabat saya yang telah membersamai, memberi semangat, hiburan sejak SMA.
11. Sahabat konser “Fourtwnty” Putri, Nisa, dan Rosyi yang telah memberikan kebahagiaan kepada penulis.
12. Diri saya sendiri yang mampu melewati segala rintangan selama masa perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 3 Februari 2025,

Pinanta Chairunnisa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	8
1.5    Kontribusi Penelitian.....	9
1.6    Sistematika Penulisan Karya Ilmiah .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1    Landasan Teori.....	11
2.1.1 <i>Stewardship theory</i> .....	11
2.1.2 <i>Diamond fraud theory</i> .....	12
2.1.3 <i>Fraud</i> .....	13
2.1.4    Pengadaan barang dan jasa .....	14
2.1.5 <i>E-procurement</i> .....	20
2.1.6    Sistem pengendalian internal .....	22
2.1.7 <i>Whistleblowing system</i> .....	24
2.1.8    Komitmen organisasi .....	24
2.1.9    Integritas.....	26
2.1.10    Pencegahan <i>fraud</i> .....	28
2.2    Tinjauan Pustaka .....	28
2.3    Pengembangan Hipotesis .....	42
2.3.1    Pengaruh <i>e-procurement</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa .....	42

2.3.2 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.....	43
2.3.3 Pengaruh <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.....	43
2.3.4 Pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.....	44
2.3.5 Pengaruh integritas terhadap terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa.....	45
2.4 Kerangka Konseptual .....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	46
3.2 Populasi dan Sampel .....	46
3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	47
3.3.1 Variabel independen.....	48
3.3.2 Variabel dependen.....	54
3.4 Lokasi Penelitian.....	55
3.5 Waktu Penelitian .....	55
3.6 Instrumen Penelitian.....	56
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.8 Teknik Analisis Data.....	57
3.8.1 Analisis statistik deskriptif.....	57
3.8.2 Uji kualitas data.....	57
3.8.3 Uji asumsi klasik .....	58
3.8.4 Analisis regresi linear berganda.....	59
3.8.5 Uji hipotesis .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Gambaran Umum Responden .....	61
4.2 Karakteristik Responden .....	62
4.3 Uji Validitas .....	65
4.4 Uji Reliabilitas .....	69
4.5 Statistik Deskriptif .....	70
4.6 Uji Normalitas .....	72
4.7 Uji Multikolinieritas.....	73
4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	74
4.9 Regresi Linier Berganda .....	75
4.10 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	77
4.11 Uji F .....	78
4.12 Uji t .....	79

4.13 Pengaruh <i>E-Procurement</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa .....	81
4.14 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa .....	83
4.15 Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa.....	86
4.16 Pengaruh Komitmen Organsisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa.....	87
4.17 Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa.....	90
<b>BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
5.1 Simpulan .....	93
1.2 Implikasi.....	95
5.3 Keterbatasan dan Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 2.2 Mapping Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Variabel Indikator E-Procurement.....	48
Tabel 3.2 Indikator Variabel Sistem Pengendalian Internal .....	50
Tabel 3.3 Indikator Variabel Whistleblowing System.....	51
Tabel 3.4 Indikator Variabel Komitmen Organisasi .....	52
Tabel 3.5 Indikator Variabel Integritas .....	53
Tabel 3.6 Indikator Variabel Pencegahan Fraud.....	54
Tabel 3.7 Skala Likert.....	56
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	62
Tabel 4.2 Karakteristik Usia Responden.....	62
Tabel 4.3 Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....	63
Tabel 4.4 Karakteristik Pendidikan Responden .....	63
Tabel 4.5 Karakteristik Lama Bekerja Responden .....	64
Tabel 4.6 Karakteristik Jabatan Responden .....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas E-Procurement .....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal.....	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Whistleblowing System .....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi .....	67
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Integritas.....	68
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Pencegahan Fraud .....	68
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas .....	69
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas .....	72
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas .....	73
Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	74
Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	77
Tabel 4.20 Hasil Uji F .....	78
Tabel 4.21 Hasil Uji t .....	79
Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal .....	83
Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal .....	84
Tabel 4.24 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal .....	84
Tabel 4.25 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi .....	88
Tabel 4.26 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi .....	88
Tabel 4.27 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi .....	88
Tabel 4.28 Distribusi Frekuensi Integritas .....	90

Tabel 4.29 Distribusi Frekuensi Integritas .....	91
Tabel 4.30 Distribusi Frekuensi Integritas .....	91

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ..... 45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian .....	103
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	104
Lampiran 3 Jawaban Kuesioner .....	114
Lampiran 4 Uji Validitas <i>E-Procurement</i> .....	137
Lampiran 5 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal.....	140
Lampiran 6 Uji Validitas <i>Whistleblowing System</i> .....	142
Lampiran 7 Uji Validitas Komitmen Organisasi .....	144
Lampiran 8 Uji Validitas Integritas.....	145
Lampiran 9 Uji Validitas Pencegahan <i>Fraud</i> .....	147
Lampiran 10 Uji Reliabilitas.....	149
Lampiran 11 Uji Multikolinieritas .....	150
Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas .....	151
Lampiran 13 Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	151
Lampiran 14 Distribusi Frekuensi E-Procurement .....	152
Lampiran 15 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal.....	154
Lampiran 16 Distribusi Frekuensi Whistleblowing System .....	156
Lampiran 17 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi .....	157
Lampiran 18 Distribusi Frekuensi Integritas.....	158
Lampiran 19 Distribusi Frekuensi Integritas.....	159
Lampiran 20 Distribusi Frekuensi Pencegahan Fraud .....	160

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini masyarakat telah merasakan banyak manfaat akibat berkembangnya perekonomian global secara pesat. Perkembangan perekonomian ini dirasakan pada lingkup swasta maupun pemerintah (Septiawan & Ningsih, 2020). Akan tetapi, perkembangan perekonomian yang pesat tidak hanya membawa dampak positif, namun juga memunculkan dampak negatif, yaitu meningkatnya *fraud* atau kecurangan (Christian & Ricardo, 2022). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) *fraud* merupakan tindakan yang melenceng dari hukum, tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu berupa keuntungan untuk tiap individu maupun kelompok tertentu, namun dapat merugikan pihak lain yang tidak terlibat. Pada umumnya, *fraud* dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atau jabatan di suatu instansi (Fitriani *et al.*, 2022).

*Fraud* menurut *fraud diamond theory* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan *fraud* biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami suatu sistem dalam suatu instansi atau organisasi serta mengetahui celah untuk melakukan kecurangan jika terdapat kesempatan.

Kasus *fraud* di Indonesia kerap kali terjadi di instansi pemerintah, terlebih pada pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut dibuktikan dengan data tindak pidana korupsi berdasarkan instansi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2024), dimana instansi pemerintah kabupaten/kota menempati urutan pertama pada kasus korupsi sejak tahun 2019-2023 dengan jumlah 309 kasus. Oleh karena itu, instansi pada pemerintah kabupaten/kota rawan terhadap tindakan *fraud*. Komisi Pemberantasan Korupsi (2024) menunjukkan tindak pidana korupsi yang kerap terjadi pada tahun 2019-2023 adalah gratifikasi atau penyuapan dengan jumlah kasus sebanyak 424, disusul oleh aktivitas pengadaan barang dan jasa yang berjumlah 151 kasus. Data dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan bahwa kasus pengadaan barang dan jasa terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Dilansir dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian skala nasional hingga daerah. Maka dari itu, diperlukan perhatian khusus pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

*Fraud* pada pengadaan barang dan jasa dinilai merugikan banyak pihak karena berdampak langsung pada perekonomian negara (Fitriani *et al.*, 2022). Kecurangan pada pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh kurangnya transparansi pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Yusni, 2022). Oleh karena itu, pemerintah melakukan pencegahan terhadap terjadinya *fraud* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, salah satunya dengan menerapkan sistem *E-Procurement*. Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, *E-*

*Procurement* merupakan proses pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sistem *E-Procurement* dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan karena adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ketika proses pengadaan berlangsung, serta mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dan penyedia jasa (Hasanah *et al.*, 2023). Meskipun demikian, tindakan *fraud* tetap dapat terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa karena pelaku *fraud* dapat memanfaatkan keterbatasan sistem (Astuti & Prabowo, 2023). Maka dari itu, dalam pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa diperlukan faktor lain selain sistem *E-Procurement* untuk memaksimalkan usaha tersebut.

Kesempatan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa juga dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian internal (Romaissah *et al.*, 2019). Jika pengendalian internal buruk, maka terdapat kemungkinan terjadinya *fraud*. Sebaliknya, jika terdapat sistem pengendalian internal yang baik pada suatu instansi, maka kecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus berjalan sesuai regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, pada pernyataan sebelumnya disebutkan bahwa masih terdapat tindakan *fraud* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, seluruh pelaksana yang terlibat pada pengadaan barang dan jasa harus memiliki rasa tanggung jawab agar tidak terjadi tindakan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Tindakan *fraud* dapat diminimalisir oleh adanya komitmen pada organisasi, hal ini dikarenakan pegawai hanya fokus terhadap tujuan bersama, sehingga tidak

mementingkan kepentingan pribadi. Pegawai dapat mengerti tujuan dalam bekerja adalah untuk memenuhi kepentingan organisasi jika berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya (Yusni, 2022). Terdapat penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*, salah satunya adalah rendahnya keadaan ekonomi (Anlilua & Rusmita, 2023). Dalam kondisi tersebut, pihak yang terlibat tindak kecurangan pastinya akan mementingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu dibandingkan kepentingan orgnasisasi, terlebih ketika adanya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan tindak kecurangan. Dengan demikian, komitmen pada organisasi dinilai penting dan perlu diterapkan agar tidak terjadi *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Pada pelaksanaanya, integritas pegawai sangat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan sikap integritas dapat mendorong pegawai berperilaku berdasarkan kode etik yang berlaku (Febriansyah & Indirwan, 2022). *Fraud* pada pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir jika setiap pegawai berintegritas tinggi. Setiap pegawai akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dimana peraturan tersebut merupakan dasar yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berjalan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menekan terjadinya tindakan *fraud* pada instansi pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah penerapan *whistleblowing system* pada sektor pemerintahan (Anlilua & Rusmita, 2023). Dalam rangka menciptakan pemerintahan bebas dari korupsi dan

berintegritas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuntut adanya pembangunan zona integritas di setiap instansi pemerintah. Penerapan *whistleblowing system* menjadi salah satu indikator dalam pembangunan zona integritas di instansi pemerintah. Saat ini telah banyak instansi pemerintah yang menerapkan *whistleblowing system* (Pramudyastuti *et al.*, 2021). Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan banyaknya kasus fraud pada sektor pemerintah, terlebih pada aktivitas pengadaan barang dan jasa yang kasusnya meningkat setiap tahun.

Salah satu kasus *fraud* pada pengadaan barang dan jasa adalah kasus *fraud* pada renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka, yaitu Edy Wahyudi selaku Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Sugiharto selaku Direktur Utama PT Arsigraphi, dan Heri Sukamto Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara dan Direktur PT Duta Mas Indah. Dilansir dari tirto.id (20/10/2023), Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa Edy Wahyudi diduga menunjuk langsung PT Arsigraphi melalui Sugiharto untuk menyusun tahapan perencanaan pengadaan terkait nilai anggaran renovasi Stadion Mandala Krida. Nilai anggaran yang direncanakan oleh Sugiharto adalah senilai 135 miliar untuk masa 5 tahun dan disetujui langsung oleh Edy Wahyudi tanpa dikaji ulang. Dalam perencanaan nilai anggaran tersebut, KPK menduga adanya *mark-up* pada beberapa item pekerjaan. Selain itu, Edy Wahyudi menetapkan secara sepihak perusahaan dan merek pada bahan penutup atap stadion. Edy Wahyudi menyetujui keinginan Heri Sukamto

selaku Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara dan Direktur PT Duta Mas Indah untuk dimenangkan dalam proses lelang pelaksanaan proyek tanpa dilakukannya evaluasi kelengkapan dokumen persyaratan lelang.

Dari 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki laman resmi terkait informasi layanan pengadaan barang dan jasa, yaitu <https://pengadaan.jogjakota.go.id/>. Informasi yang dapat diperoleh pada laman tersebut antara lain, tata cara pendaftaran terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pelatihan dan diskusi terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa, serta layanan pelaporan kecurangan disajikan dengan jelas, baik yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta menyediakan “Klinik Pengadaan” pada laman tersebut. Klinik Pengadaan merupakan forum yang menjadi media untuk diskusi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Forum tersebut ditujukan untuk pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Yogyakarta atau dapat diikuti oleh pegawai di wilayah Daerah Istimewa Kota Yogyakarta. Adanya laman yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pengadaan barang dan jasa memudahkan pelaku pengadaan untuk memperoleh informasi dengan baik. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara lengkap dibandingkan dengan 4 kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kasus *fraud* yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta membuktikan bahwa pencegahan *fraud* pada lingkup pemerintah masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya untuk memberikan fasilitas yang memadai terhadap seluruh pelaku pengadaan di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, didapat judul berupa “Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *E-Procurement* memengaruhi pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal memengaruhi pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah *Whistleblowing System* memengaruhi pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa?
4. Apakah Komitmen Organisasi memengaruhi pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa?

5. Apakah Integritas memengaruhi pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.
4. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai Komitmen Organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.
5. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai *E-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pencegahan *fraud* pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang merupakan layanan publik agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

## **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini berperan dalam memperluas informasi berdasarkan pengujian atas faktor-faktor (*e-procurement*, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan integritas) yang memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

## **1.6 Sistematika Penulisan Karya Ilmiah**

Sistematikan penulisan karya ilmiah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini merupakan bagian awal dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan karya ilmiah.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini membahas tentang teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini berisi tentang bagaimana penelitian akan diolah, mencakup tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**5. BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bagian ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran, implikasi, bagian akhir, daftar pustaka, surat izin penelitian,

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan sekumpulan teori yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, bertujuan untuk menjelaskan dan menjadi dasar suatu penelitian (Arikunto, 2014).

##### **2.1.1 *Stewardship theory***

*Stewardship Theory* oleh Donaldson dan Davis (1991) merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajer hanya berfokus terhadap tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi. (Oktavianus & Rahman, 2001) memberi pernyataan bahwa *Stewardship Theory* merupakan salah satu cara bagaimana pengelolaan suatu organisasi dan pihak yang terlibat di dalamnya melalui pendekatan, yaitu kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, kepercayaan, serta pelayanan. Berdasarkan penjabaran tersebut, teori ini membahas terkait komitmen seorang pemimpin pada suatu organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi karena fokus terhadap tujuan organisasi. Teori ini juga memiliki pandangan bahwa *steward* dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan publik (Astuti & Prabowo, 2023).

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai organisasi sektor publik jika dikaitkan dengan *stewardship theory* adalah suatu organisasi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan bertanggung

jawab agar mencapai tujuan organisasi, yaitu kepuasan masyarakat, peningkatan pelayanan, serta meningkatnya perekonomian masyarakat.

Penerapan *Stewardship Theory* pada penelitian ini mengasumsikan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai *steward*. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik diharapkan mampu memberi kepuasan kepada masyarakat. Maka dari itu, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Terdapat faktor internal yang memotivasi seseorang dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu pengakuan dan komitmen pada organisasi (Davis *et al.*, 1997). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan pernyataan tersbut, yaitu menggunakan faktor-faktor internal berupa sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan integritas.

### **2.1.2 *Diamond fraud theory***

*Diamond fraud theory* adalah tinjauan baru terhadap penyebab terjadinya *fraud* yang dicetuskan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dalam teori tersebut terdapat tambahan satu faktor penyebab *fraud*, dimana sebelumnya hanya terdapat tiga faktor dalam *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1950). Pada *diamond fraud theory* disebutkan empat penyebab terjadinya *fraud*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *capability* (kemampuan) yang merupakan pembeda dari *fraud triangle theory*. Pentingnya faktor *capability* (kemampuan) dalam pendekripsi terjadinya *fraud*

adalah karena adanya kemampuan seseorang memainkan peran untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004).

### **2.1.3 *Fraud***

*Fraud* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu pihak atau kelompok yang memiliki wewenang untuk mendapatkan keuntungan dengan tindakan yang curang (IFAC, 2020). *Fraud* dapat disimpulkan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain dan dampak buruk lainnya.

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) memaparkan klasifikasi *fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Terdapat tiga klasifikasi *fraud* berdasarkan hal yang ditimbulkan oleh kecurangan, yaitu (Karyono, 2013):

1. Korupsi

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena dalam tindakannya terdapat keterlibatan dengan banyak pihak, seperti penyuapan dan korupsi. Korupsi yang terjadi dapat berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan tidak sah, serta pemerasan.

2. Penyalahgunaan aset

Penyalahgunaan aset merupakan tindakan pengambilan aset perusahaan secara tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan secara hukum. Terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan aset, yaitu:

a. *Lapping*

*Lapping* merupakan tindakan menyembunyikan atau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi yang didapatkan dari hasil tagihan piutang. Uang akan

disetorkan sebagai pembayaran piutang kepada perusahaan jika terdapat pembayaran piutang berikutnya, sehingga terlihat seperti pembayaran piutang yang sebelumnya (Tuanakotta, 2018).

b. *Kitting*

*Kitting* merupakan tindakan penggelapan dana dengan cara menarik dana dari suatu bank lalu disetorkan di bank lainnya dan dilakukan secara terus menerus (Tuanakotta, 2018).

c. *Skimming*

*Skimming* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak dalam perusahaan dimana pihak tersebut mencuri uang sebelum uang tersebut dicatat dalam suatu transaksi atau pembukuan (Tuanakotta, 2018).

3. Kecurangan laporan keuangan

Pernyataan palsu merupakan keadaan dimana terdapat pihak dalam suatu perusahaan atau instansi yang menutupi dan merekayasa laporan keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

#### **2.1.4 Pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan menggunakan APBN/APBD mulai dari proses identifikasi hingga serah terima hasil pekerjaan.

Tujuan diadakannya pengadaan barang dan jasa tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut.

1. Menghasilkan barang atau jasa yang sesuai berdasarkan uang yang telah dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
3. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi.
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
6. Meningkatkan keterlibatan industri kreatif.
7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha.
8. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dari itu terdapat tujuh prinsip pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut.

1. Efisien

Pengadaan barang dan jasa diharapkan mencapai hasil secara maksimal dengan biaya dan sumber daya seminimal mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif

Pengadaan barang dan jasa diharapkan mampu memberikan nilai manfaat yang tinggi pada barang atau jasa yang dihasilkan.

### 3. Transparan

Pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada peserta yang akan terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa serta masyarakat umum.

### 4. Terbuka

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya bebas diikuti oleh penyedia barang/jasa dengan syarat telah memenuhi kriteria dan mematuhi ketentuan yang ada.

### 5. Bersaing

Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan persaingan sehat antar penyedia barang atau jasa agar terhindar dari kecurangan atau penyimpangan.

### 6. Adil

Pengadaan barang dan jasa dilakukan tanpa mementingkan kepentingan pihak tertentu.

### 7. Akuntabel

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya harus tepat sasaran baik dalam konteks fisik, keuangan, hingga nilai manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdapat pelaku pengadaan yang memiliki peran masing-masing pada bidangnya. Pelaku pengadaan dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa memiliki etika. Etika dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, antara lain bertanggung jawab, profesional dan independen, jujur, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang serta tidak menerima pemberian apapun untuk menguntungkan salah

satu pihak (Arifin & Haryani, 2014). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, terdapat delapan pelaku pengadaan barang atau jasa pemerintah, antara lain sebagai berikut.

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang diberikan kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian wewenang serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang memiliki wewenang yang diberikan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan maupun tindakan dalam pengeluaran APBN/APBD.

4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun *E-Purchasing*.

5. Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemilihan merupakan pihak-pihak yang ditetapkan oleh kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.

6. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan Unit Pengadaan Barang dan Jasa atau pelaku usaha yang diberikan wewenang oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah sebagai pemberi pekerjaan.

7. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

8. Penyedia

Penyedia merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak yang telah disetujui.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat dua metode proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, antara lain sebagai berikut.

1. Swakelola

Swakelola merupakan cara memperoleh barang atau jasa melalui pengelolaan langsung yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok masyarakat. Dalam metode swakelola, terdapat empat tipe pengadaan sebagai berikut.

a. Tipe I

Pada tipe I, proses swakelola direncanakan, dilaksanakan, serta diawasi secara langsung oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.

b. Tipe II

Pada tipe II, proses swakelola direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran serta akan

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksanaan Swakelola.

c. Tipe III

Pada tipe III, proses swakelola direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran serta akan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.

d. Tipe IV

Pada tipe IV, proses swakelola direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan akan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana.

2. Penyedia

Pada metode penyedia, pihak penyedia diharuskan untuk memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Penyedia diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas barang dan jasa, ketepatan perhitungan jumlah maupun volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan lokasi penyeraham. Terdapat lima metode pelaksanaan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, antara lain sebagai berikut.

a. *E-Purchasing*

*E-Purchasing* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai maksimal Rp200.000.000,00.

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ketika keadaan tertentu, seperti konferensi mendadak, hanya satu pelaku usaha yang dapat memenuhi, barang atau jasa bersifat rahasia.

d. Tender Cepat

Tender cepat merupakan metode pemilihan berdasarkan spesifikasi serta volume pekerjaan telah ditentukan secara detail dan pelaku usaha telah masuk pada kualifikasi pada sistem informasi kinerja penyedia.

e. Tender

Tender merupakan metode pemilihan yang akan digunakan ketika empat metode penyedia yang disebutkan sebelumnya tidak dapat digunakan.

### **2.1.5 *E-procurement***

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa berdasarkan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Diperlukan efisiensi, efektifitas, serta transparansi penggunaan untuk mencapai sistem pengadaan publik yang baik (Francesco & Hastuti, 2022). Penerapan *e-procurement* bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pada pengguna dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa melalui sistem elektronik (Suprianto *et al.*, 2019). Oleh karena itu untuk mendukung adanya transparansi dalam pengadaan publik, pemerintah menciptakan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa *e-procurement* merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta sistem pendukung. SPSE adalah sistem yang dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Pada keseluruhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SPSE telah meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, serta katalog elektronik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan pasar elektronik (*e-marketplace*), terdapat berbagai macam sistem di dalamnya, seperti katalog elektronik (*e-catalogue*), toko daring, dan pemilihan penyedia.

Berkaitan pada penelitian ini, *e-procurement* sebagai sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya fraud dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Perlu ditegaskan kembali bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah terhadap publik, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

### **2.1.6 Sistem pengendalian internal**

Sistem pengendalian internal adalah sistem yang terkoordinasi dalam organisasi, metode, serta ketentuan untuk efektifitas dan efisiensi organisasi tersebut (Tuanakotta, 2019). Sistem pengendalian internal pada perusahaan, pemerintah, hingga perusahaan negara daerah terbilang penting keberadaannya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik serta untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *fraud* (Francesco & Hastuti, 2022). Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan (Tuanakotta, 2019). Penerapan sistem pengendalian internal di pemerintahan terutama dalam pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat diterapkan oleh pimpinan maupun pegawai agar proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan secara konstan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan secara wajar berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut.

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Petinggi atau pemegang kuasa dalam instansi pemerintah diharuskan untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang positif. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut.

- a. Integritas dan etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi

- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi berdasarkan kebutuhan
- e. Pendeklasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terkait pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

## 2. Penilaian risiko

Penilaian risiko pada instansi pemerintah perlu untuk dillakukan untuk menyesuaikan kegiatan dengan tujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penilaian risiko dapat difokuskan pada beberapa hal berikut.

- a. Identifikasi risiko guna mengetahui metodologi, mekanisme dan faktor lain penyebab risiko
  - b. Analisis risiko guna menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
3. Kegiatan pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan pengendalian internal

### **2.1.7 *Whistleblowing system***

*Whistleblowing system* adalah salah satu bentuk pengendalian internal dengan sistem pelaporan atau pengungkapan terkait dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, kode etik perusahaan oleh pegawai di perusahaan (Hoffman & Robert, 2008). *Whistleblowing system* merupakan tindakan seorang pegawai maupun kelompok dalam memberi tahu adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Pada umumnya, pengungkapan dilakukan dengan cara rahasia (KNKG, 2008). *Whistleblowing system* dapat muncul ketika terdapat konflik antara loyalitas pegawai dan perlindungan kepentingan publik. Syafitri dan Syafdinal (2023) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Dalam hal tersebut, *whistleblowing* secara internal yang dimaksud adalah pegawai suatu instansi yang melaporkan tindak kecurangan kepada atasannya. Sedangkan *whistleblowing* secara eksternal terjadi ketika pegawai suatu instansi memberitahukan kepada khalayak umum adanya kecurangan pada instansi tersebut karena merugikan banyak pihak.

### **2.1.8 Komitmen organisasi**

Komitmen organisasi adalah suatu sikap dimana organisasi menunjukkan keinginan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara mempertahankan aktivitas organisasi (Steers & Porter, 2011). Komitmen organisasi merupakan keadaan dimana seorang pegawai memihak tujuan organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Meutia, 2021). Dari kedua pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas pegawai dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam penerapan komitmen organisasi diperlukan aspek-aspek yang mendukung agar dapat berjalan. Steers & Porter (2011) mengemukakan terdapat tiga aspek komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut.

### 1. Identifikasi

Identifikasi merupakan suatu bentuk penerimaan terhadap tujuan organisasi yang disetujui pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Identifikasi oleh pegawai dapat meliputi kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai organisasi, serta terdapat rasa bangga karena menjadi bagian dari organisasi tersebut.

### 2. Keterlibatan

Keterlibatan merupakan usaha pegawai untuk melakukan tugas serta kewajiban yang diberikan. Dalam hal ini, pegawai diharuskan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan secara maksimal. Kepercayaan dari organisasi kepada pegawai pada tugas yang diberikan akan mendorong pegawai untuk melakukan pekerjaan lain apabila diperlukan, selain itu pegawai juga akan bekerjasama dengan baik kepada pimpinan ataupun rekan kerja.

### 3. Loyalitas

Loyalitas merupakan bentuk kesediaan pegawai dalam bekerja terhadap organisasi. Loyalitas pada pegawai dapat tercipta jika pegawai merasakan kenyamanan dan keamanan ketika bekerja dalam organisasi tersebut, sehingga

pegawai akan memiliki komitmen untuk terus bekerja dalam organisasi tersebut dengan baik.

Edison (2018) menyebutkan bahwa dalam menjalankan komitmen organisasi terdapat faktor-faktor yang memengaruhi, antara lain sebagai berikut.

#### 1. Faktor Logis

Pegawai akan bertahan dalam organisasi karena adanya faktor yang logis, seperti jabatan yang sesuai, penghasilan cukup, serta sulitnya mencari pekerjaan yang lebih baik.

#### 2. Faktor Lingkungan

Pegawai memiliki komitmen terhadap organisasi karena lingkungan kerja yang baik dan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam organisasi.

#### 3. Faktor Harapan

Pegawai memiliki kesempatan untuk memiliki jenjang karir yang tinggi dalam organisasi secara kompetitif melalui sistem yang terbuka.

#### 4. Faktor Ikatan Emosional

Pegawai memiliki rasa ikatan emosional pada organisasi, seperti perasaan bahwa organisasi telah memberikan jasa dalam hidupnya melalui pendapatan yang diberikan.

### **2.1.9 Integritas**

Integritas merupakan sikap konsistensi terhadap pendapat, nilai, dan prinsip yang menjunjung tinggi kejujuran serta jauh dari penyimpangan (Sari *et al.*, 2024).

Integritas adalah suatu bentuk komitmen individu yang memegang prinsip ideologi

yang etis, sehingga membentuk perilaku yang serupa (Schlenker, 2008). Dengan demikian, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, integritas merupakan aspek penting untuk mencegah adanya penyimpangan atau kecurangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, integritas juga merupakan dasar yang menentukan kepercayaan publik (Asha *et al.*, 2020).

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diharuskan mematuhi etika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk integritas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 disebutkan delapan etika, antara lain sebagai berikut.

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

### **2.1.10 Pencegahan *fraud***

Pencegahan *fraud* atau kecurangan merupakan upaya yang dilakukan manajemen dengan menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur agar menjadi dasar atas tindakan yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan dalam mencapai tujuan utama, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Comitte of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2013). Pencegahan *fraud* pada sektor publik dapat dicapai dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi untuk mencegah terjadinya kecurangan (Karyono, 2013). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu cara untuk mencegah atau meminimalisir tindakan *fraud* pada suatu instansi/organisasi.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka menurut Arikunto (2014) merupakan kajian terhadap pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya tinjauan pustaka, diharapkan dapat mengetahui permasalahan pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang relevan.

Penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini terkait pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa serta dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka antara lain sebagai berikut.

Hambani *et al.*, (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui data seberapa besar pengaruh dari *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* pada proses pengadaan barang/jasa. Hasil dari penelitian tersebut adalah *e-procurement*, *whistleblowing system*, pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Bogor. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu integritas dan komitmen organisasi. Penelitian yang akan dilakukan memperluas populasi dengan melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat yang berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pengadaan barang/jasa.

Septiawan dan Ningsih (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan *E-Procurement* dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan

Efektivitas Pencegahan *Fraud Pengadaan barang dan Jasa*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efektivitas pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa oleh Rumah Sakit Bhayangkara dinilai cukup efektif. Implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa oleh Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bandung. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu integritas, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi.

Leatemia dan Febryanti (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud Pengadaan Barang* (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit pemerintah Kota Ambon. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit pemerintah Kota Ambon.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pada rumah sakit pemerintah Kota Ambon. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu *e-procurement*, integritas, dan *whistleblowing system*.

Utami *et al.* (2020) melakukan penelitian yang berjudul “*The Effects of E-Procurement Implementation and Integrity to Fraud Prevention Against the Government Procurement of Goods/Services Fraud with Intention as the Moderating Variable on The Government of Makassar City*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* dan integritas terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa dengan keinginan sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan *e-procurement* dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, keinginan memoderasi *e-procurement* dan integritas terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Makassar

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada

Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi. Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi.

Fitriani *et al.* (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa melalui *Whistleblowing System* dan Kesadaran Anti-*Fraud*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* dan kesadaran anti-*fraud* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Hasil dari penelitian tersebut adalah *whistleblowing system* dan kesadaran anti-*fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Palembang. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu *e-procurement*, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan integritas.

Francesco dan Hastuti (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Cimahi. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Cimahi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Cimahi. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu integritas, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi.

Yusni (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* barang/jasa dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai moderasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi *e-procurement* dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* barang/jasa pemerintah. Selain itu, Sistem pengendalian internal memoderasi *e-procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* barang/jasa pemerintah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada

Pemerintah Kabupaten Banggai. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu integritas dan *whistleblowing system*. Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi.

Hasanah *et al.* (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh *e-procurement* dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian tersebut adalah *e-procurement* dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu sistem pengendalian internal, integritas, dan komitmen organisasi.

Astuti dan Prabowo (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi *e-procurement* tidak

berpengaruh signifikan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan integritas.

Syafitri dan Syafidinal (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Hasil dari penelitian tersebut adalah sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Selain itu, terdapat tambahan variabel, yaitu *e-procurement*, komitmen organisasi, dan integritas.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Romaissah <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Implementasi Sistem <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1 : <i>E-Procurement</i> X2 : Pengendalian Internal  <b>Objek Penelitian:</b> Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Pekalongan	- <i>E-Procurement</i> tidak berpengaruh  - Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan
2	Hambani <i>et al.</i> (2020)	Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor)	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1: <i>E-Procurement</i> X2: <i>Whistleblowing System</i> X3: Pengendalian Internal  <b>Objek Penelitian:</b> Dinas Pemerintah Kota Bogor	- <i>E-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan  - <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif dan signifikan  - Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan
3	Septiawan & Ningsih (2020)	Penerapan <i>E-Procurement</i> dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1: <i>E-Procurement</i> X2: Pengendalian Internal  <b>Objek Penelitian:</b> Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung	- <i>E-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan  - Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
4	Leatemia & Febryanti (2020)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon)	Y : Pencegahan Fraud X1: Pengendalian Internal X2: Komitmen Organisasi  <b>Objek Penelitian:</b> Rumah Sakit Pemerintah Kota Ambon	- Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan  - Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan
5	Utami <i>et al.</i> (2020)	<i>The Effects of E-Procurement Implementation and Integrity to Fraud Prevention Against the Government Procurement of Goods/Services Fraud with Intention as the Moderating Variable on The Government of Makassar City</i>	Y : Pencegahan Fraud X1: <i>E-Procurement</i> X2: Integritas Z : Tujuan  <b>Objek Penelitian:</b> Pemerintah Kota Makassar	- E-procurement berpengaruh positif dan signifikan  - Integritas berpengaruh positif dan signifikan  - Tujuan memoderasi pengaruh integritas terhadap pencegahan fraud
6	Francesco & Hastuti (2022)	Pengaruh Penerapan <i>e-procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)	Y : Pencegahan Fraud X1: <i>E-Procurement</i> X2: Sistem Pengendalian Internal  <b>Objek Penelitian:</b> Pemerintah Kota Cimahi	- <i>E-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan  - Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
7	Yusni (2022)	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud Pengadaan Barang/Jasa</i> sebagai Variabel Moderasi	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1: <i>E-Procurement</i> X2: Komitmen Organisasi Z : Sistem Pengendalian Internal  <b>Objek Penelitian:</b> Pemerintah Kabupaten Banggai	- <i>E-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan  - Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan
8	Hasanah <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh <i>E-Procurement</i> dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin</i>	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1: <i>E-Procurement</i> X2: <i>Whistleblowing System</i>  <b>Objek Penelitian:</b> Pemerintah Kabupaten Banyuasin	- <i>E-procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan  - <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif dan signifikan
9	Astuti & Prabowo (2023)	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pencegahan <i>Fraud Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1: <i>E-Procurement</i> X2: Sistem Pengendalian Internal  <b>Objek Penelitian:</b> Pemerintah Kota Semarang	- <i>E-procurement</i> tidak berpengaruh  - Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan
10	Syafitri & Syafdinal (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1: Sistem Pengendalian Internal X2: <i>Whistleblowing System</i>  <b>Objek Penelitian:</b> PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero)	- Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan  - <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif dan signifikan

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
11	Faradilla & Sofyan (2024)	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> , Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Y : Pencegahan <i>Fraud</i> X1 : <i>E-Procurement</i> X2 : Sistem Pengendalian Internal X3 : <i>Whistleblowing System</i>  <b>Objek Penelitian:</b> Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	- <i>E-Procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan  - Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan  - <i>Whistleblowing System</i> tidak berpengaruh

**Tabel 2.2 Mapping Penelitian Terdahulu**

Variabel	Peneliti											Simpulan	Variabel
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<i>E-Procurement</i>	0	+	+		+	+	+	+	0		+	Tidak Konsisten	X1
Sistem Pengendalian Internal	+	+	+	+		+			+	+	+	Konsisten	X2
Integritas					+							Belum Banyak	X5
<i>Whistleblowing System</i>		+						+		+	0	Tidak Konsisten	X3
Komitmen Organisasi				+			+					Belum Banyak	X4

**Keterangan:**

1. Romaissah *et al.* (2019), Pengaruh Implementasi Sistem *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Hambani *et al.* (2020), Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor)
3. Septiawan & Ningsih (2020), Penerapan *E-Procurement* dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa
4. Leatemia & Febryanti (2020), Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon)
5. Utami *et al.* (2020), *The Effects of E-Procurement Implementation and Integrity to Fraud Prevention Against the Government Procurement of Goods/Services Fraud with Intention as the Moderating Variable on The Government of Makassar City*
6. Francesco & Hastuti (2022), Pengaruh Penerapan *e-procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)
7. Yusni (2022), Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

8. Hasanah *et al.* (2023), Pengaruh *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
9. Astuti & Prabowo (2023), Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa
10. Syafitri & Syafidinal (2023), Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa
11. Faradilla & Sofyan (2024), Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

### **2.3 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pengembangan dari teori atau penelitian terdahulu yang relevan (Arikunto, 2014).

#### **2.3.1 Pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiawan & Ningsih (2020) dan Francesco & Hastuti (2022), ditemukan bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa, hal tersebut sejalan dengan usaha pemerintah menerapkan *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa

untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Dengan demikian, *e-procurement* dapat meminimalisir tindakan *fraud* pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : *E-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **2.3.2 Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hambani *et al.* (2020) dan Astuti & Prabowo (2023), ditemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Sistem pengendalian internal dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, sehingga sistem pengendalian internal dinilai penting dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **2.3.3 Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hambani *et al.* (2020), Hasanah *et al.* (2023) dan Syafitri & Syafdinal (2023), ditemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan

jasa. *Whistleblowing system* dapat meningkatkan kejujuran dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa karena *whistleblowing system* mendorong seluruh pihak dalam suatu instansi untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika terdapat tindak kecurangan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **2.3.4 Pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leatemia & Febryanti (2020) dan Yusni (2022), ditemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Komitmen organisasi merupakan komitmen yang dijalankan oleh seluruh pihak dalam suatu instansi. Pegawai yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan memahami bahwa tujuan bekerja adalah untuk kepentingan organisasi, sehingga dengan adanya komitmen tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **2.3.5 Pengaruh integritas terhadap terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa**

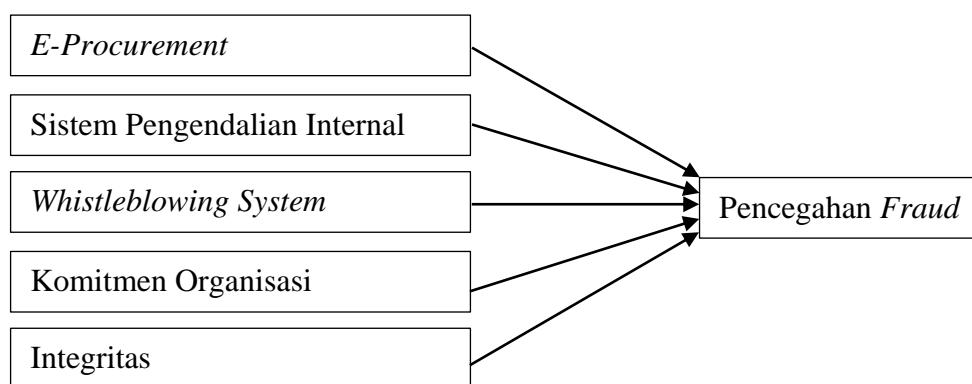
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2020), ditemukan bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Integritas yang dimiliki oleh setiap individu dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud*, hal ini disebabkan karena seorang individu yang memiliki integritas akan bekerja sesuai tujuan organisasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

### **2.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka atau gambaran yang menunjukkan hubungan antara variabel atau konsep untuk diukur dan diamati dalam suatu penelitian (Arikunto, 2014).

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang memiliki data berupa angka serta analisis data bersifat statistik (Sekaran & Bougie, 2017).

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini, teknik penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Metode survei merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat penelitian, dapat dilakukan pada populasi besar maupun kecil, data yang digunakan adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut agar didapat hubungan antar variabel (Arikunto, 2014). Kuesioner akan disebarluaskan dengan menggunakan selebaran dan media *Google Form*.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek, populasi memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar mendapatkan kesimpulan (Sekaran & Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Seluruh pegawai OPD Kota Yogyakarta yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, terdiri dari Pengguna Anggran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan bendahara.
2. Seluruh pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta, terdiri dari kepala bagian, kelompok substansi pengelolaan barang dan jasa, kelompok substansi pembinaan pengadaan barang dan jasa, kelompok substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
3. Seluruh pegawai inspektorat, terdiri dari auditor dan pengawas.

Keseluruhan dari populasi tersebut akan menjadi sampel penelitian. Oleh sebab itu, penentuan penggunaan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh digunakan ketika seluruh anggota populasi memiliki memiliki karakteristik yang relevan dan bertujuan untuk meneliti fenomena dari setiap subpopulasi secara menyeluruh (Arikunto, 2014). Hal ini disebabkan oleh adanya fungsi yang berbeda namun tetap memiliki peran penting dan saling berkaitan antara pelaku pengadaan barang dan jasa, pengelola pengadaan barang dan jasa, serta pengawas dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

### **3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian merupakan karakteristik atau kualitas individu maupun organisasi yang dapat diukur (Arikunto, 2014). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang telah ditetapkan selanjutnya akan dipelajari guna mendapatkan

kesimpulan dari penelitian. Adapun uraian variabel dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut.

### **3.3.1 Variabel independen**

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen (Arikunto, 2014). Terdapat lima variabel independen pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

#### 1. *E-Procurement*

*E-Procurement* merupakan sistem informasi antar-organisasi berbasis internet yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses pengadaan secara efektif, transparan, dan akuntabilitas (Astuti & Prabowo, 2023).

**Tabel 3.1 Variabel Indikator *E-Procurement***

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Efisien	1	Penilaian kebutuhan	Suatu barang/jasa yang diperoleh merupakan barang/jasa yang benar-benar diperlukan oleh instansi pemerintahan atau kebutuhan masyarakat
	2	Evaluasi dan penilaian	Suatu barang/jasa yang diperoleh telah memenuhi standar dengan harga yang wajar melalui evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran
Efektif	3	Kualitas terbaik	Suatu barang/jasa yang diperoleh memiliki kualitas terbaik
	4	Penyerahan tepat waktu	Penyedia barang/jasa menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati
	5	Kuantitas terpenuhi	Jumlah barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam kontrak

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Terbuka dan bersaing	6	Pengadaan barang/jasa bersifat transparan	Proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta
	7	Peluang memenangkan persaingan	Proses pengadaan barang/jasa memberikan kesempatan bagi seluruh calon peserta untuk bersaing secara kompetitif
Transparan	8	Peraturan bersifat transparan	Peraturan/kebijakan/aturan dan administrasi/prosedur diinformasikan secara transparan kepada seluruh calon peserta
	9	Seluruh persyaratan dibuat transparan	Persyaratan yang diperlukan seluruh calon peserta untuk melakukan penawaran dibuat secara transparan
	10	Kriteria, tata cara evaluasi dan penentuan pemenang bersifat transparan	Kriteria, tata cara evaluasi, dan tata cara penentuan pemenang bersifat transparan terhadap seluruh calon peserta
Adil	11	Memperlakukan seluruh peserta dengan adil	Seluruh peserta diperlakukan secara adil dan tidak memihak
	12	Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima imbalan	Seluruh pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa menolak imbalan dalam bentuk apapun
Akuntabel	13	Arsip dan pencatatan yang lengkap	Arsip dan pencatatan tersedia dalam setiap proses pengadaan barang/jasa
	14	Sistem pengawasan terhadap aturan	Sistem pengawasan terhadap aturan yang diberlakukan dalam proses pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik
	15	Mekanisme untuk tindakan terhadap keluhan oleh peserta	Mekanisme untuk mengevaluasi, meninjau, dan mengambil tindakan terhadap protes atau keluhan oleh peserta dilaksanakan dengan baik

Sumber: (Astuti & Prabowo, 2023)

## 2. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh sumber daya entitas, memastikan keakuratan entitas, serta menjamin bahwa seluruh karyawan mematuhi kebijakan manajemen sesuai hukum atau aturan yang berlaku (Hery, 2014).

**Tabel 3.2 Indikator Variabel Sistem Pengendalian Internal**

Indikator	No	Item	Pernyataan
Lingkungan pengendalian	1	Penegakkan integritas dan nilai etika	Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan integritas tinggi dan sesuai dengan nilai etika yang berlaku
	2	Komitmen terhadap kompetensi	Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan patuh terhadap prosedur yang berlaku
	3	Kepemimpinan yang kondusif	Pimpinan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa
Penilaian risiko	5	Identifikasi risiko	Proses identifikasi risiko dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak yang terkait
	6	Analisis risiko	Proses analisis risiko dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara sistematis dan mendalam
Kegiatan pengendalian	7	Pembinaan SDM	Seluruh SDM yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa rutin mendapatkan pembinaan dan pelatihan
	8	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Pengelolaan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa memiliki pengendalian yang memadai

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Komunikasi dan informasi	10	Penggunaan sarana komunikasi efektif	Sarana komunikasi dalam pengadaan barang/jasa telah efektif digunakan untuk memastikan koordinasi antar pihak yang terkait
	11	Komunikasi dalam bentuk tindakan positif	Komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa didasarkan pada tindakan positif dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku
Pemantauan	12	Pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit	Proses pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dilakukan dengan baik

Sumber: (Kusaeri *et al.*, 2022)

### 3. *Whistleblowing System*

*Whistleblowing system* merupakan bentuk pengendalian organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Komite Nasional Kebijakan Governanc (KNKG) pada tahun 2008 mengeluarkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) dan lebih dikenal dengan *whistleblowing system*. Adanya pedoman yang diciptakan oleh KNKG diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan governansi yang baik dalam pemerintahan dan korporasi di Indonesia.

**Tabel 3.3 Indikator Variabel *Whistleblowing System***

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Struktural	1	Pernyataan komitmen	Saya berkomitmen melaksanakan <i>whistleblowing system</i> untuk melaporkan terjadinya pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa
	2	Kebijakan perlindungan pelapor	Terdapat kebijakan yang jelas dan efektif untuk melindungi pelapor dalam <i>whistleblowing system</i>

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
	3	Struktur pengelolaan <i>whistleblowing system</i>	Struktur pengelolaan <i>whistleblowing system</i> telah dikelola dengan baik
	4	Kecukupan sumber daya pengelola	<i>Whistleblowing system</i> dijalankan oleh pengelola sesuai prosedur dan fasilitas yang memadai
Operasional	5	Saluran khusus pelaporan	Terdapat saluran khusus yang aman untuk pelaporan pelanggaran
	6	Kemudahan pelaporan pelanggaran	Proses pelaporan pelanggaran dapat diakses dengan mudah
Perawatan	7	Pelatihan karyawan	Pegawai secara rutin diberikan pelatihan terkait penerapan <i>whistleblowing system</i>
	8	Komunikasi penerapan terhadap karyawan	Pegawai mengetahui secara jelas mengenai prosedur dan pentingnya <i>whistleblowing system</i>

Sumber: (Fitriani *et al.*, 2022)

#### 4. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sikap pegawai yang relatif terkait keterlibatan terhadap organisasi (Leatemia & Febryanti, 2020).

**Tabel 3.4 Indikator Variabel Komitmen Organisasi**

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Komitmen afektif	1	Keterikatan emosional pegawai dengan organisasi	Saya merasa memiliki keterikatan emosional dalam melakukan pekerjaan
	2	Keterlibatan diri dalam organisasi	Saya merasa terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Komitmen berkelanjutan	3	Persepsi kurangnya alternatif pekerjaan	Saya merasa terdapat keterbatasan alternatif pekerjaan selain pekerjaan saya saat ini
Komitmen normatif	4	Tanggung jawab atas pekerjaan	Saya merasa bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
	5	Kesadaran komitmen terhadap organisasi	Saya memiliki kesadaran yang tinggi terkait komitmen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

Sumber: (Yusni, 2022)

### 5. Integritas

Integritas adalah suatu komitmen pribadi seorang pegawai terhadap prinsip ideologi yang etis mencakup kejujuran, kesetiaan, memenuhi kewajiban, serta ketidaktinginan untuk melakukan pelanggaran (Schlenker, 2008).

**Tabel 3.5 Indikator Variabel Integritas**

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Inti	1	Jujur	Saya bersikap jujur dan transparan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	2	Bertanggung jawab	Saya bertanggung jawab terhadap setiap tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	3	Disiplin	Saya disiplin terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Etos Kerja	4	Mandiri	Saya bekerja secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain atas tugas yang menjadi tanggung jawab saya
	5	Kerja keras	Saya bekerja keras terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar berjalan secara lancar dan sesuai prosedur yang berlaku
	6	Sederhana	Saya bersikap sederhana dan tidak berlebihan atas pekerjaan yang saya miliki

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Sikap	7	Berani	Saya memiliki sikap berani atas risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	8	Peduli	Saya peduli terhadap kesulitan yang dialami setiap pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	9	Adil	Saya bersikap adil dan tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan barang/jasa

Sumber: (Widiawati & Eriswanto, 2023)

### 3.3.2 Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang muncul akibat dari adanya variabel independen (Arikunto, 2014). Berikut adalah variabel dependen dalam penelitian ini.

#### 1. Pencegahan *Fraud*

Karyono (2013) menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada organisasi.

**Tabel 3.6 Indikator Variabel Pencegahan *Fraud***

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Memperkuat kerangka hukum	1	Penerapan pedoman yang berlaku	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku
	2	Penerapan prinsip-prinsip pengadaan	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa
Prosedur yang transparan	3	Pelaksanaan secara transparan	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Item</b>	<b>Pernyataan</b>
Membuka dokumen tender	4	Tender dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan	Pelaksanaan tender pada pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
Evaluasi penawaran	5	Evaluasi secara adil	Proses evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara adil
	6	Tidak mengarahkan keputusan pemenang pada penyedia tertentu	Keputusan pemenang tender tidak berpihak pada penyedia tertentu
Melimpahkan wewenang	7	Audit independen dapat mengungkap adanya manipulasi	Audit independen yang dilakukan dapat mengungkap adanya manipulasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	8	Tidak memberikan wewenang untuk menyetujui kontrak kepada staff lain	Wewenang atas persetujuan kontrak pengadaan barang/jasa hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki wewenang
Pemeriksaan dan audit independen	9	Audit independen memiliki peran penting dalam proses pengadaan	Audit independen memiliki peran penting dalam memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan

Sumber: (Francesco & Hastuti, 2022)

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian ini terletak di Kota Yogyakarta. Adapun alasan penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta terletak pada latar belakang yang telah disajikan.

### **3.5 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian berlangsung selama bulan Januari 2025.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, responden hanya dapat memilih jawaban yang telah tersedia. Pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Dalam Ghazali (2018) skala *likert* merupakan skala yang memuat lima preferensi jawaban dengan menggunakan skor sebagai berikut.

**Tabel 3.7 Skala *Likert***

Kriteria	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarluaskan kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2014). Kuesioner yang telah disusun dalam bentuk daftar pertanyaan oleh peneliti akan disebarluaskan kepada responden. Kuesioner dapat diisi dengan cara memberikan centang pada kolom yang telah ditentukan. Peneliti akan menerima kembali kuesioner yang telah diisi

oleh responden. Tujuan penyebaran kuesioner kepada responden adalah untuk memperoleh data yang relevan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kepada responden sesuai dengan lokasi penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh (Arikunto, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software SPSS 27*.

#### **3.8.1 Analisis statistik deskriptif**

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skeweness* (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

#### **3.8.2 Uji kualitas data**

##### a. Uji validitas

Uji validitas dalam penelitian digunakan untuk mengukur sah dan valid atau tidak suatu kuesioner. Kuisisioner dapat dikatakan valid jika instrumen pertanyaan

pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018).

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil dari alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Variabel dapat dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas minimal 0,6. Suatu alat ukur dikatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach alpha* kurang dari 0,6 (Ghozali, 2018).

### **3.8.3 Uji asumsi klasik**

a. Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian digunakan untuk menguji data yang telah didapat terdistribusi secara normal atau tidak normal (Ghozali, 2018). Data dapat dikatakan baik jika data memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Data yang telah diolah dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data melalui grafik berupa titik pada sumbu diagonal. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika data menyebar tidak di sekitar garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka data tidak terdistribusi dengan normal.

b. Multikolininearitas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar satu variabel independen dengan variabel independen lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak

terdapat korelasi antar variabel. Jika nilai *tolerance* >0,1 dan VIF <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2018).

### **3.8.4 Analisis regresi linear berganda**

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen yang diduga memengaruhi variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2017). Model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = *E-procurement*

$X_2$  = Sistem pengendalian internal

$X_3$  = *Whistleblowing system*

$X_4$  = Komitmen organisasi

$X_5$  = Integritas

$\beta_1$ - $\beta_5$  = Koefisien regresi berganda

e = *Error*

### **3.8.5 Uji hipotesis**

- a. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengungkapkan variasi dari variabel independen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol hingga satu, jika nilai mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Akan tetapi, jika nilai mendekati satu, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

b. Uji F

Uji simultan atau uji F dalam penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak, namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima (Ghozali, 2018).

c. Uji t

Uji parsial atau uji t dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Suatu variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Responden**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *e-procurement*, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan integritas terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 106 responden di 34 OPD Kota Yogyakarta. Responden dapat memilih untuk mengisi secara tertulis ataupun melalui tautan Google Formulir. Setiap OPD, kecuali Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diwakili oleh 3 responden, yaitu PA/KPA, PPK, dan bendahara. Terdapat 8 responden pada Inspektorat, yaitu auditor madya, auditor mahir, auditor pertama, auditor muda, auditor terampil, auditor pelaksana, PPUPD ahli pertama, dan PPUPD ahli terampil. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 4 responden, yaitu kepala bagian, kelompok substansi pengelolaan barang dan jasa, kelompok substansi pembinaan pengadaan barang dan jasa, kelompok substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pokja pemilihan. Penyebaran kuesioner hingga memperoleh jawaban dari responden dimulai sejak tanggal 6 Januari 2025 hingga 17 Januari 2025. Berikut adalah distribusi kuesioner beserta tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah.

**Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Distribusi Kuesioner	109	100%
Kuesioner yang tidak kembali	2	2%
Kuesioner yang diolah	107	98%
N Sampel = 104		
Responden Rate = (107/109) x 100% = 98%		

Sumber: data diperoleh, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 109 dengan tingkat pengembalian 98%, sehingga total kuesioner yang dapat diolah berjumlah 107 kuesioner.

## 4.2 Karakteristik Responden

Data penelitian diperoleh melalui kuesioner dari 107 responden memiliki karakteristik yang meliputi usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, lama bekerja, dan jabatan yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

### a. Usia

**Tabel 4.2 Karakteristik Usia Responden**

Usia	Jumlah	Persentase
< 31 Tahun	10	9%
31- 45	46	43%
> 45 Tahun	51	48%
Total	107	100%

Sumber: data diperoleh, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebesar 9% responden berusia kurang dari 31 tahun, 43% responden berusia dalam rentang 31- 45 tahun, dan 48%

responden berusia lebih dari 45 tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan mayoritas usia responden adalah lebih dari 45 tahun.

b. Jenis kelamin

**Tabel 4.3 Karakteristik Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	52	49%
Perempuan	55	51%
Total	107	100%

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 49% responden berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 51% responden berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

c. Jenjang pendidikan

**Tabel 4.4 Karakteristik Pendidikan Responden**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK/Sederajat	4	4%
Diploma	6	6%
S1	62	58%
S2	35	33%
Total	107	100%

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 4% responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK/Sederajat, 6% responden dengan pendidikan terakhir diploma, 58% responden dengan pendidikan terakhir S1, dan 33% responden dengan pendidikan terakhir S2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah pada jenjang S1.

d. Lama bekerja

**Tabel 4.5 Karakteristik Lama Bekerja Responden**

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	18	17%
6-10 Tahun	9	8%
11-15 Tahun	19	19%
>15 Tahun	58	56%
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 17% responden bekerja dalam rentang waktu 1-5 tahun, 8% responden bekerja dalam rentang waktu 6-10 tahun, 19% responden bekerja dalam rentang waktu 11-15, dan 56% responden bekerja lebih dari 15 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja lebih dari 15 tahun.

e. Jabatan

**Tabel 4.6 Karakteristik Jabatan Responden**

Jabatan	Jumlah	Persentase
PA/KPA	32	30%
PPK	30	28%
Bendahara	32	30%
Auditor	6	6%
Pengawas	2	2%
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1%
Kelompok substansi pengadaan barang dan jasa	3	3%
Pokja Pemilihan	1	1%
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa terdapat 30% responden yang menjabat sebagai PA/KPA, 28% responden menjabat sebagai PPK, 30% responden menjabat sebagai bendahara, 6% responden menjabat sebagai auditor, 2% responden menjabat sebagai pengawas, 1% responden menjabat sebagai kepala bagian pengadaan barang dan jasa, 3% responden menjabat dalam kelompok substansi pengadaan barang dan jasa, dan 1% responden menjabat sebagai pokja pemilihan.

### 4.3 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korealsi *pearson product moment* yang memiliki ketentuan jika nilai  $r_{hitung} >$  nilai  $r_{tabel}$  maka item pernyataan dapat dikatakan valid. Dalam menentukan nilai  $r_{tabel}$  digunakan perhitungan dengan *degree of freedom (df) = n-2*, n merupakan jumlah sampel (Ghozali, 2018). Terdapat 107 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini, sehingga diperoleh nilai  $df = 107-2 = 105$ . Oleh karena itu, diperoleh nilai  $r_{tabel}$  untuk df 105 adalah 0,190. Berikut adalah hasil uji validitas setiap variabel dalam penelitian ini.

#### a. *E-Procurement*

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas *E-Procurement***

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
<i>E-Procurement</i>	X1.1	0,715	0,190	Valid
	X1.2	0,693	0,190	Valid
	X1.3	0,678	0,190	Valid
	X1.4	0,762	0,190	Valid

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
	X1.5	0,818	0,190	Valid
				Valid
	X1.6	0,745	0,190	
	X1.7	0,821	0,190	Valid
	X1.8	0,811	0,190	Valid
	X1.9	0,805	0,190	Valid
	X1.10	0,792	0,190	Valid
	X1.11	0,864	0,190	Valid
	X1.12	0,789	0,190	Valid
	X1.13	0,805	0,190	Valid
	X1.14	0,719	0,190	Valid
	X1.15	0,684	0,190	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel e-procurement dinilai valid. Hal ini disebabkan oleh nilai  $r_{hitung}$  atau *pearson correlation* lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,190.

#### b. Sistem Pengendalian Internal

**Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal**

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0,783	0,190	Valid
	X1.2	0,761	0,190	Valid
	X1.3	0,765	0,190	Valid
	X1.4	0,814	0,190	Valid
	X1.5	0,776	0,190	Valid
	X1.6	0,707	0,190	Valid
	X1.7	0,707	0,190	Valid
	X1.8	0,774	0,190	Valid
	X1.9	0,795	0,190	Valid
	X1.10	0,727	0,190	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel sistem pengendalian internal dinilai valid. Hal ini disebabkan oleh nilai  $r_{hitung}$  atau *pearson correlation* lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,190.

c. *Whistleblowing System*

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas *Whistleblowing System***

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
<i>Whistleblowing System</i>	X3.1	0,816	0,190	Valid
	X3.2	0,853	0,190	Valid
	X3.3	0,771	0,190	Valid
	X3.4	0,785	0,190	Valid
	X3.5	0,863	0,190	Valid
	X3.6	0,790	0,190	Valid
	X3.7	0,786	0,190	Valid
	X3.8	0,831	0,190	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel *whistleblowing system* dinilai valid. Hal ini disebabkan oleh nilai hal ini disebabkan oleh nilai  $r_{hitung}$  atau *pearson correlation* lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,190.

d. Komitmen Organisasi

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi**

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Komitmen Organisasi	X4.1	0,805	0,190	Valid
	X4.2	0,847	0,190	Valid
	X4.3	0,688	0,190	Valid
	X4.4	0,798	0,190	Valid
	X4.5	0,728	0,190	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel komitmen organisasi dinilai valid. Hal ini disebabkan oleh nilai hal ini disebabkan oleh nilai  $r_{hitung}$  atau *pearson correlation* lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,190.

e. Integritas

**Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Integritas**

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Integritas	X5.1	0,720	0,190	Valid
	X5.2	0,813	0,190	Valid
	X5.3	0,766	0,190	Valid
	X5.4	0,796	0,190	Valid
	X5.5	0,692	0,190	Valid
	X5.6	0,730	0,190	Valid
	X5.7	0,716	0,190	Valid
	X5.8	0,804	0,190	Valid
	X5.9	0,770	0,190	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel integritas dinilai valid. Hal ini disebabkan oleh nilai hal ini disebabkan oleh nilai  $r_{hitung}$  atau *pearson correlation* lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,190.

f. Pencegahan *Fraud*

**Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Pencegahan *Fraud***

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y1	0,795	0,190	Valid
	Y2	0,836	0,190	Valid

Variabel	Item	Pearson Correlation	r-tabel	Keterangan
Y	Y3	0,847	0,190	Valid
	Y4	0,817	0,190	Valid
	Y5	0,844	0,190	Valid
	Y6	0,877	0,190	Valid
Y	Y7	0,746	0,190	Valid
	Y8	0,827	0,190	Valid
	Y9	0,772	0,190	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan dalam variabel pencegahan *fraud* dinilai valid. Hal ini disebabkan oleh nilai hal ini disebabkan oleh nilai  $r_{hitung}$  atau *pearson correlation* lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang bernilai 0,190.

#### 4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan berdasarkan perhitungan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas	Item	Cronbach Alpha	Keterangan
<i>E-Procurement</i>	X1	0,949	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	X2	0,919	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	X3	0,925	Reliabel
Komitmen Organisasi	X4	0,819	Reliabel
Integritas	X5	0,906	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	Y	0,937	Reliabel

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* variabel *E-Procurement* sebesar 0,949, variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,919, variabel *Whistleblowing System* sebesar 0,925, variabel komitmen organisasi sebesar 0,819, variabel integritas sebesar 0,906, dan variabel pencegahan *fraud* sebesar 0,937. Seluruh variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini dinilai reliabel dan layak digunakan untuk data penelitian.

#### 4.5 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu data penelitian yang diperoleh melalui nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif.

**Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	<b>Descriptive Statistics</b>				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-Procurement</i>	107	3,87	5,00	4,5033	.39316
Sistem Pengendalian Internal	107	3,20	5,00	4,4065	.39675
<i>Whistleblowing System</i>	107	3,00	5,00	4,2864	.50103
Komitmen Organisasi	107	3,00	5,00	4,2131	.48546
Integritas	107	3,44	5,00	4,3447	.42549
Pencegahan <i>Fraud</i>	107	3,22	5,00	4,4797	.43577

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa terdapat 107 responden yang menjadi sampel penelitian. Berikut adalah deskripsi untuk setiap variabel.

1. *E-Procurement* (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,87, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,5033, dan nilai standar deviasi sebesar 0,39316. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa implementasi *e-procurement* sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum.
2. Sistem Pengendalian Internal (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,20, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,4065, dan nilai standar deviasi sebesar 0,39675. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal di instansi terakit sudah cukup efektif, dibuktikan dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum.
3. *Whistleblowing System* (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,2864, dan nilai standar deviasi sebesar 0,50103. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa responden menilai penerapan *whistleblowing system* di instansi terkait sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum.
4. Komitmen Organisasi (X4) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,2131, dan nilai standar deviasi sebesar 0,48546. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa komitmen organisasi berjalan dengan baik di instansi terkait, dibuktikan dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum.
5. Integritas (X5) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,44, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,3447, dan nilai standar deviasi sebesar

0,42549. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa integritas responden dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum.

6. Pencegahan *Fraud* (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,22, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,4797, dan nilai standar deviasi sebesar 0,43577. Nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa responden telah menilai bahwa tindakan pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa telah diterapkan secara efektif.

#### **4.6 Uji Normalitas**

Model regresi dapat dikatakan baik jika memiliki distribusi yang normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini.

**Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		107
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std.	
	Deviation	223.108.023
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.073
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.078

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,078. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

#### 4.7 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai *tolerance* >0,1 dan VIF <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini.

**Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)				
<i>E-procurement</i>	.483		.483	2.071
Sistem Pengendalian Internal	.342		.342	2.921
<i>Whistleblowing System</i>	.568		.568	1.762
Komitmen Organisasi	.467		.467	2.139
Integritas	.480		.480	2.085

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel pada penelitian ini kurang dari 10 dan nilai *tolerance*, seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,1. *E-procurement* (X1) memiliki nilai VIF sebesar 2,071 dan nilai tolerance sebesar 0,483, sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai VIF sebesar 2,921 dan nilai tolerance sebesar 0,342, *whistleblowing system* (X3)

memiliki nilai VIF sebesar 1,762 dan nilai tolerance sebesar 0,568, komitmen organisasi (X4) memiliki nilai VIF sebesar 2,139 dan nilai tolerance sebesar 0,467, integritas (X5) memiliki nilai VIF sebesar 2,085 dan nilai tolerance sebesar 0,480. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

#### 4.8 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan membuat regresi antara variabel independen dengan nilai absolut residual. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokesdastisitas (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji heterokesdastisitas dalam penelitian ini.

**Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	Sig.
1 (Constant)	.905	
<i>E-Procurement</i>	.069	
Sistem Pengendalian Internal	.235	
<i>Whistleblowing System</i>	.502	
Komitmen Organisasi	.243	
Integritas	.278	

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05. *E-procurement* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,905, sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar

0,069, *whistleblowing system* (X<sub>3</sub>) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,502, komitmen organisasi (X<sub>4</sub>) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,243, dan integritas (X<sub>5</sub>) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,278. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model yang dibuat tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

#### 4.9 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis melalui *software* SPSS 27 terhadap 5 variabel independen, yaitu *e-procurement* (X<sub>1</sub>), sistem pengendalian internal (X<sub>2</sub>), *whistleblowing system* (X<sub>3</sub>), komitmen organisasi (X<sub>4</sub>), dan integritas (X<sub>5</sub>) terhadap pencegahan fraud (Y) dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

**Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	Unstandardized Coefficients
	B	
1 (Constant)	.204	
<i>E-Procurement</i>	.135	
Sistem Pengendalian Internal	.261	
<i>Whistleblowing System</i>	.108	
Komitmen Organisasi	.255	
Integritas	.225	

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat pada kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta dan baris berikutnya menunjukkan variabel independen. Oleh karena itu didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 0,204 + 0,135X_1 + 0,261X_2 + 0,108X_3 + 0,255X_4 + 0,225X_5$$

Persamaan regresi yang telah diperoleh akan dijelaskan secara lebih lanjut di bawah ini.

- a. Konstanta sebesar 0,204 memiliki arti bahwa jika variabel independen tetap maka nilai pencegahan *fraud* (Y) adalah sebesar 0,204.
- b. Koefisien regresi variabel *e-procurement* ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,135, sehingga jika variabel independen lain memiliki nilai tetap dan *e-procurement* mengalami peningkatan 1 dalam satuan, maka pencegahan *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,135. Koefisien bernilai positif, maka terdapat hubungan positif antara *e-procurement* dan pencegahan *fraud*.
- c. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,261, sehingga jika variabel independen lain memiliki nilai tetap dan sistem pengendalian internal mengalami peningkatan 1 dalam satuan, maka pencegahan *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,261. Koefisien bernilai positif, maka terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.
- d. Koefisien regresi variabel *whistleblowing system* ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,108, sehingga jika variabel independen lain memiliki nilai tetap dan *whistleblowing system* mengalami peningkatan 1 dalam satuan, maka pencegahan *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,108. Koefisien

bernilai positif, maka terdapat hubungan positif antara *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud*.

- e. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi ( $X_4$ ) adalah sebesar 0,255, sehingga jika variabel independen lain memiliki nilai tetap dan komitmen organisasi mengalami peningkatan 1 dalam satuan, maka pencegahan *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,255. Koefisien bernilai positif, maka terdapat hubungan positif antara komitmen organisasi dan pencegahan *fraud*.
- f. Koefisien regresi variabel integritas ( $X_5$ ) adalah sebesar 0,225, sehingga jika variabel independen lain memiliki nilai tetap integritas mengalami peningkatan 1 dalam satuan, maka pencegahan *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,225. Koefisien bernilai positif, maka terdapat hubungan positif antara integritas dan pencegahan *fraud*.

#### **4.10 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabel dependen. Model regresi yang baik dalam menjelaskan variabel dependen adalah yang memiliki nilai adjusted  $R^2$  mendekati satu (Ghozali, 2018).

**Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.822 <sup>a</sup>	.676	.660	.25424	

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,660 atau sebesar 66%. Oleh karena itu, variabel *e-procurement*, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, komitmen organisasi, dan integritas mampu untuk menjelaskan variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sebanyak 66%. Sedangkan sisanya, sebesar (100% - 66% = 34%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4.11 Uji F

Uji f dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,005, maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji f dalam penelitian ini.

**Tabel 4.20 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.601	5	2.720	42.082	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6.529	101	.065		
	Total	20.129	106			

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,005. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model pada penelitian ini dinilai layak digunakan. Dengan kata lain, seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### 4.12 Uji t

Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018). Ketentuan untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hipotesis adalah jika nilai  $\text{sig.} < 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai  $\text{sig.} > 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji t dalam penelitian ini.

**Tabel 4.21 Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	.204	.315		.649	.518
<i>E-procurement</i>	.135	.090	.122	1.495	.138
Sistem Pengendalian Internal	.261	.106	.238	2.455	.016
<i>Whistleblowing System</i>	.108	.066	.124	1.639	.104
Komitmen Organisasi	.255	.074	.285	3.435	.001
Integritas	.225	.084	.220	2.689	.008

Sumber: data diolah, 2025

Nilai  $t_{\text{tabel}}$  yang akan digunakan diperoleh menggunakan rumus *probability* dengan *degree of freedom* (df). Nilai df dapat dicari dengan perhitungan jumlah data dikurangi jumlah seluruh variabel. Terdapat 107 responden yang menjadi sampel pada penelitian ini, sehingga diperoleh nilai  $df = 107 - 6 = 101$ . Oleh karena itu, diperoleh nilai  $t_{\text{tabel}}$  untuk df 101 adalah 0,193. Berikut adalah penjelasan hipotesis untuk setiap variabel berdasarkan Tabel 4.19.

- a. *E-procurement* ( $X_1$ ) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,138 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,495 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang berbunyi bahwa *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa ditolak karena pengujian hipotesis bernilai tidak signifikan.
- b. Sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,455 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Hasil tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang berbunyi bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa diterima.
- c. *Whistleblowing system* ( $X_3$ ) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,104 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,639 yang artinya lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang berbunyi bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa ditolak karena pengujian hipotesis bernilai tidak signifikan.

- d. Komitmen organisasi ( $X_4$ ) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,435 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Hasil tersebut menjelaskan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang berbunyi bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa diterima.
- e. Integritas ( $X_5$ ) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,689 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Hasil tersebut menjelaskan bahwa integritas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, maka hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang berbunyi bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa diterima.

#### **4.13 Pengaruh *E-Procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada pengujian variabel *e-procurement* terhadap variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,138 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,495 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang berbunyi bahwa *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa ditolak. Artinya, meskipun

berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menyebutkan bahwa implementasi *e-procurement* telah berjalan dengan baik di Pemerintah Kota Yogyakarta, sistem *e-procurement* tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Tujuan adanya *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, masih terdapat kecurangan yang dapat terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sistem *e-procurement* memiliki tahapan yang begitu kompleks, yaitu persiapan pemilihan penyedia, perencanaan pemilihan penyedia, melakukan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan, penyerahan hasil pengadaan. Tahapan yang kompleks tersebut memberi celah bagi pelaku tindak kecurangan, seperti pertemuan di luar kepentingan proses pengadaan untuk mencari kesepakatan dan memperoleh keuntungan, kerja sama antara pejabat pengadaan dan vendor atau antar vendor untuk memenangkan tender, hingga adanya manipulasi harga. Seperti contoh kasus yang telah disebutkan di latar belakang bahwa terdapat persekongkolan antar pihak yang terjadi di luar sistem *e-procurement*. Kegiatan tersebut tidak dapat terdeteksi oleh sistem *e-procurement*, sehingga diperlukan faktor lain untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hambani *et al.* (2020), Septiawan & Ningsih (2020), Utami *et al.* (2020), Francesco & Hastuti (2022), Yusni (2022), Hasanah *et al.* (2020), Faradilla & Sofyan (2024) yang menyebutkan bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan

terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun, penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romaissah *et al.* (2019), Astuti & Prabowo (2023) yang menyebutkan bahwa *e-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### **4.14 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada pengujian variabel sistem pengendalian internal terhadap variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,455 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang berbunyi bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa diterima. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dapat mencegah terjadinya *fraud* di bidang pengadaan barang dan jasa.

Dalam hasil distribusi frekuensi, terdapat tiga pernyataan yang memiliki nilai sangat tinggi, yaitu sebagai berikut.

1. Proses analisis risiko dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara sistematis dan mendalam.

**Tabel 4.22 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	4	3,7%	3,7%	3,7%
Setuju	72	45,8%	45,8%	71,0%

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Setuju	31	53,3%	53,3%	100%
Total	107	100%	100%	

2. Seluruh SDM yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa rutin mendapatkan pembinaan dan pelatihan.

**Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	8	7,5%	7,5%	7,5%
Setuju	68	63,6%	63,6%	71,0%
Sangat Setuju	31	29,0%	29,0%	100%
Total	107	100%	100%	

3. Proses identifikasi risiko dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

**Tabel 4.24 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	2	1,9%	1,9%	1,9%
Setuju	66	61,7%	61,7%	63,6%
Sangat Setuju	39	36,4%	36,4%	100%
Total	107	100%	100%	

Sistem pengendalian internal jika diterapkan dengan baik dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan distribusi frekuensi yang disajikan, sistem pengendalian internal di Pemerintah Kota Yogyakarta didominasi oleh proses identifikasi risiko telah dilakukan secara menyeluruh serta dianalisis secara sistematis dan seluruh pegawai rutin mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Hal tersebut dibuktikan pada laman

resmi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta kerap melakukan *workshop* dan pelatihan terhadap seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal telah berjalan baik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Sistem pengendalian internal harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah berlaku, khususnya pada sistem pengendalian pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Jika terjadi penyimpangan di sebuah instansi, dapat ditelusuri penyebabnya dengan cepat apabila instansi tersebut menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik, sehingga dapat mencegah kasus serupa terulang kembali. Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif mampu mencegah terjadinya praktik *fraud* pada pengadaan publik (Astuti & Prabowo, 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romaissah *et al.* (2019), Hambani *et al.* (2020), Septiawan & Ningsih (2020), Leatemia & Febryanti (2020), Francesco & Hastuti (2022), Astuti & Prabowo (2023), Syafitri & Syafidinal (2023), Faradilla & Sofyan (2024) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### **4.15 Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada pengujian pengaruh variabel *whistleblowing system* terhadap variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,104 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,639 yang artinya lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Berdasarkan hasil tersebut dapat hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang berbunyi bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa ditolak. Artinya, meskipun berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menyebutkan bahwa *whistleblowing system* telah berjalan dengan baik di Pemerintah Kota Yogyakarta, *whistleblowing system* tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan wadah bagi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaporkan tindak kecurangan melalui *whistleblowing system* yang dikelola oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Dalam penerapannya, diperlukan jaminan keamanan untuk pelapor tindak kecurangan agar terlindung dari ancaman. Belum banyak ASN yang berani melaporkan adanya kecurangan di instansi yang dinaungi karena dalam pelaporan tindak kecurangan diperlukan bukti dan informasi yang jelas agar tindak kecurangan tersebut dapat ditelusuri. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait penggunaan *whistleblowing system*, sehingga belum banyak pegawai yang mengetahui bagaimana cara melaporkan penyimpangan atau kecurangan melalui *whistleblowing system*. Oleh karena itu, *whistleblowing system*

belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan karena keterbatasan seperti, kurangnya bukti tindak kecurangan, keberanian pelapor, serta sistem yang memadai.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hambani *et al.* (2020), Hasanah *et al.* (2020), Syafitri & Syafdinal (2023) yang menyebutkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla & Sofyan (2024) yang menyebutkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### **4.16 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud Pengadaan Barang dan Jasa***

Pada pengujian pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap variabel pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,435 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang berbunyi bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa diterima. Artinya, semakin baik komitmen organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dapat mencegah terjadinya *fraud* di bidang pengadaan barang dan jasa.

Dalam hasil distribusi frekuensi, terdapat tiga pernyataan yang memiliki nilai sangat tinggi, yaitu sebagai berikut.

1. Saya merasa terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 4.25 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	4	16,8%	16,8%	16,8%
Setuju	63	52,3%	52,3%	69,2%
Sangat Setuju	40	30,8%	30,8%	100%
Total	107	100%	100%	

2. Saya merasa memiliki keterikatan emosional dalam melakukan pekerjaan..

**Tabel 4.26 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	8	7,5%	7,5%	7,5%
Setuju	60	56,1%	56,1%	63,6%
Sangat Setuju	39	36,4%	36,4%	100%
Total	107	100%	100%	

3. Saya merasa bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

**Tabel 4.27 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	4	3,7%	3,7%	3,7%
Setuju	63	58,9%	58,9%	62,6%
Sangat Setuju	40	37,4%	37,4%	100,0%
Total	107	100%	100%	

Komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan, dalam hal ini jika pegawai merasa memiliki keterikatan terhadap apa yang dikerjakan, maka pegawai akan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi yang telah disajikan, komitmen organisasi pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta didominasi oleh sikap keterikatan emosional dalam melakukan pekerjaan, keterlibatan secara aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar berjalan sesuai prosedur, serta kesadaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip. Hal tersebut sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan situasi para manajemen atau pegawai tidak memiliki dorongan untuk kepentingan pribadi, namun lebih memprioritaskan kepentingan organisasi. Dalam hal ini, kepentingan organisasi merujuk pada kepentingan publik. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, disebutkan bahwa komitmen organisasi telah berjalan baik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, jika seorang pegawai menerapkan komitmen organisasi dengan baik, maka praktik *fraud* pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh pegawai dapat dicegah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Leatemia dan Febryanti (2020), Yusni (2022) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

#### **4.17 Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada pengujian pengaruh variabel integritas terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,675 yang artinya lebih besar dari  $t_{tabel}$  yang memiliki nilai sebesar 0,193. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang berbunyi bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa diterima. Artinya, semakin baik integritas pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka dapat mencegah terjadinya *fraud* di bidang pengadaan barang dan jasa.

Dalam hasil distribusi frekuensi, terdapat tiga pernyataan yang memiliki nilai sangat tinggi, yaitu sebagai berikut.

1. Saya bekerja secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain atas tugas yang menjadi tanggung jawab saya.

**Tabel 4.28 Distribusi Frekuensi Integritas**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	13	12,1%	12,1%	12,1%
Setuju	61	57,0%	57,0%	69,2%
Sangat Setuju	33	30,8%	30,8%	100%
Total	107	100%	100%	

2. Saya memiliki sikap berani atas risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**Tabel 4.29 Distribusi Frekuensi Integritas**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	0,9%	0,9%	0,9%
Netral	9	8,4%	8,4%	9,3%
Setuju	64	59,8%	59,8%	69,2%
Sangat Setuju	33	30,8%	30,8%	100%
Total	107	100%	100%	

3. Saya bekerja keras terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar berjalan secara lancar dan sesuai prosedur yang berlaku.

**Tabel 4.30 Distribusi Frekuensi Integritas**

Indikator	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Netral	5	4,7%	4,7%	4,7%
Setuju	68	63,6%	63,6%	68,2%
Sangat Setuju	34	31,8%	31,8%	100%
Total	107	100%	100%	

Konsep *diamond fraud theory* menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang menyebabkan terjadinya *fraud*, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Integritas yang dimiliki oleh setiap individu dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Sebab, *fraud* tidak terjadi hanya karena adanya kesempatan, namun juga karena adanya tekanan dan kemampuan untuk melakukan *fraud*. Selain itu, adanya rasionalisasi atau pemberian juga dapat menjadi alasan praktik *fraud* dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi yang telah disajikan, integritas pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta didominasi oleh sikap tidak bergantung kepada orang lain, berani terhadap risiko pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa, serta berusaha agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, jika setiap individu memiliki integritas, maka individu tersebut akan jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif disebutkan bahwa integritas telah berjalan baik di Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga dapat disimpulkan bahwa integritas dapat mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2020) yang menyebutkan bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut.

*E-procurement* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penerapan *e-procurement* masih memiliki kekurangan meskipun adanya sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kekurangan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* dapat berupa kurangnya pengawasan terhadap jalannya pengadaan barang dan jasa secara langsung, keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan sistem, adanya rangkap jabatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta adanya kendala atau celah pada sistem yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, adanya *e-procurement* belum mampu mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakata.

Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. di Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam

pemerintahan dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku agar dapat dipatuhi. Jika terjadi penyimpangan, maka dapat dilakukan identifikasi terkait penyebab penyimpangan tersebut kemudian dilakukan evaluasi untuk mencegah penyimpangan terjadi kembali di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan sistem pengendalian internal mampu mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Yogyakarta.

*Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. *Whistleblowing system* Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki sistem yang memadai untuk digunakan. Namun, masih terdapat kekurangan seperti tidak terdapat sosialisasi secara rutin terkait *whistleblowing system*. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi untuk menyampaikan kecurangan melalui *whistleblowing system*. Selain itu, ketika melaporkan suatu penyimpangan harus disertai adanya bukti yang konkret, sulitnya mencari bukti juga dapat menjadi kemungkinan *whistleblowing system* belum optimal menjadi faktor dalam pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, *whistleblowing system* belum mampu mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Terdapat komitmen yang tinggi oleh pegawai dapat meminimalisir terjadinya tindak kecurangan. Hal tersebut disebabkan oleh keinginan pegawai untuk mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kepentingan organisasi merujuk pada kepentingan publik. Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi mampu

mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Pegawai yang berintegritas tinggi akan bersikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan. Pengadaan barang dan jasa memiliki tahapan yang kompleks serta keterlibatan dari banyak pihak, sehingga rentan terjadi tindak kecurangan. Tindak kecurangan dapat diminimalisir jika seorang pegawai berpegang teguh atas pendiriannya, sehingga tidak mudah dipengaruhi orang lain. Oleh karena itu, integritas mampu mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

## 1.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-procurement* agar dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Sistem pengendalian internal yang telah diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dipertahankan dan melakukan evaluasi secara berkala agar tetap relevan sebagai pencegahan *fraud*.
3. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diberikan pelatihan atau penyuluhan secara rutin terkait penggunaan *whistleblowing system* agar dapat digunakan secara optimal.

4. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pegawai untuk terus mengimplementasikan komitmen organisasi agar pegawai senantiasa melakukan pekerjaan dengan tujuan kepentingan publik.
5. Integritas yang telah tercipta di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dipertahankan dengan cara menciptakan lingkungan yang bebas dan aman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap tugas sesuai dengan wewenang masing-masing agar mencegah terjadinya *fraud*.

### **5.3 Keterbatasan dan Saran**

Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti hanya mengambil satu perwakilan dari setiap sampel karena adanya kendala untuk mengambil lebih dari satu sampel di beberapa OPD.
2. Peneliti tidak memantau secara langsung terkait pengisian kuesioner yang telah disebarluaskan karena terbatasnya waktu yang dimiliki pegawai OPD.

Adapun saran penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel untuk setiap OPD untuk hasil yang lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis, seperti pada tingkat provinsi atau tingkat nasional.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meniadakan rangkap jabatan pada pelaku pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan *e-procurement* dapat berjalan dengan efektif.

4. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di luar sistem *e-procurement*.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat melakukan sosialisasi penggunaan *whistleblowing system* secara rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- Anlilua, P., & Rusmita, S. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 34-48.
- Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Politeknik Negeri Jakarta*, 115-122.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asha, A. F., Anto, L. O., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis Tingkat Integritas Pengelola Pengadaan dan Tingkat Kepercayaan Penyedia terhadap Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 71-82.
- Astuti, E., & Prabowo, T. J. (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-12.
- Christian, N., & Ricardo, P. (2022). Kajian Impact of Fraud: Nasional dan Internasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 102-117.
- Comitte of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission. (2013). *Internal Control - Integrated Framework*. North Carolina: Coso.
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 738-743.
- Davis, J. H., Schoorman, D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 20-47.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory. *Australian Journal of Management*, 49-64.
- Emron Edison, Y. A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Faradilla, H., & Sofyan, E. (2024). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 234-246.

- Febriansyah, A., & Indirwan, I. (2022). Pengaruh Integritas Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Kasus Kpp Pratama Bandung Bojonagara). *JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting*, 220-230.
- Francesco, I. M., & Hastuti. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 237-243.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambani, S., Warizal, Kusuma, I. C., & Ramadianti. (2020). Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida*, 147-162.
- Hasanah, A. N., Maria, & Oktarida, A. (2023). Pengaruh E-Procurement dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* , 631-637.
- Hery. (2014). *Accounting Principles*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hoffman, W. M., & Robert, E. (2008). A Bussiness Ethics Theory of Whistleblowing. *Journal of Bisnis and Environmental Ethics*, 45-59.
- IFAC. (2020). Retrieved from IFAC: <https://www.iaasb.org/consultations-projects/fraud>
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblower System-WBS)*. Jakarta: KNKG.
- Korupsi, K. P. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Instansi*. Jakarta: KPK.

- Kusaeri, G., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1173-1182.
- Latemia, S. Y., & Febryanti, N. F. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Empiris pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Ambon). *Arika*, 15-22.
- Meutia, T. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Fraud pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Timur. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 79-90.
- Mumpuni, A. (2023, October 20). *KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-stadion-mandala-krida-gRkj>
- Mumpuni, A. (2023, Oktober 20). *KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-stadion-mandala-krida-gRkj>
- Oktavianus, P., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 419-432.
- Pramudyastuti, O. L., Utpala, R., Prativi, A., Nugraheni, & Susilo, G. F. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 115-135.
- Purwanto, E., Mulyadi, & Anwar, C. (2017). Kajian Konsep Diamond Fraud Theory dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 149-162.
- Rahayu, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2023). Analysis of the Factors Affecting the Effectiveness of Preventing Fraud in the Procurement of Goods and Service (an Empirical Study on Regional Apparatus Organization of Pekanbaru City). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 499-509.
- Romaissah, Imtikanah, S., & Hidayah , R. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Majalah Neraca*, 65-80.

- Sari, L. Y., Masnila, N., & Indrisari, D. (2024). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2874-2878.
- Schlenker, B. R. (2008). Integrity and Character: Implications of Principled and Expedient Ethical Ideologies. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 1078-1125.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiawan, B., & Ningsih, D. F. (2020). Penerapan E-Procurement Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 269-287.
- Silmi Syifa Syafitri, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 866-878.
- Steers, R. M., & Porter, L. W. (2011). *Motivation and Work Behaviour*. New York: New York Academic Pers.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 251-259.
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba.
- Utami, D., Haliah, & Indrijawati, A. (2020). The Effects Of E-Procurement Implementation And Integrity to Fraud Prevention Against The Government Procurement Of Goods/Services Fraud With Intention As The Moderating Variable On The Government Of Makassar City. *Journal of Research in Business and Management*, 11-20.
- Widiawati, S., & Eriswanto, E. (2023). Pengaruh Corporate Culture Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Sukabumi). *Akunteknologi: Jurnal Ilmia Akuntansi dan Teknologi*, 1-10.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 38-42.

Yusni. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 138-148.

## Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Alamat : Jalan SWK 104 Lingkar Utara Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 55283  
 Telp. (0274) 486255, 487276 Faximile : (0274) 486255  
 Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id> – e-mail: feb@upnyk.ac.id

Nomor : 208/UN62.14/AKD.5/I/2025  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : Proposal  
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yogyakarta, 2 Januari 2025

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....

Di

.....

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta tentang kewajiban penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang menempuh Program Sarjana (S1).

Melalui surat ini mohon diijinkan mahasiswa kami :

Nama	: Pinanta Chairunnisa
NIM	: 142210135
No. Telepon/HP	: 085766957367
Program Studi	: Ekonomi Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Untuk dapat memperoleh data/keterangan dari Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan Skripsi dengan judul :

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta

Keterangan : a. Data yang diperoleh hanya untuk tulisan ilmiah  
 b. Lama mencari data ± 2 (bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,  
 Alumni dan Kerja Sama

Dr. Jamzani Sodik, S.E., M.Si  
 NIP. 197102172021211003

## Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner  
Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara Responden  
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam upaya mendapatkan informasi atau data guna keperluan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, maka saya:

Nama : Pinanta Chairunnisa  
NIM : 142210135

Menyampaikan permohonan untuk ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden pada penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan *Fraud* pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara mengisi kuesioner secara objektif agar informasi yang diperoleh relevan. Informasi yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara sangat berguna dalam penelitian ini.

Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini:

1. Tidak terdapat jawaban yang benar atau salah
2. Tidak diperkenankan untuk mengosongkan jawaban
3. Identitas dan jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya
- 4.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas waktu yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Pinanta Chairunnisa  
142210135

## KUESIONER PENELITIAN

### OPSI PENGISIAN

Responden diperkenankan untuk memilih salah satu dari dua opsi pengisian kuesioner yang tersedia sesuai dengan keinginan dan kenyamanan Bapak/Ibu/Saudara, yaitu dengan cara:

1. Mengisi kuesioner menggunakan lembar kertas yang telah dibagikan; **atau**
2. Mengisi kuesioner melalui tautan [bit.ly/KuesionerPenelitian\\_Pinanta](https://bit.ly/KuesionerPenelitian_Pinanta) atau dapat memindai kode QR di bawah ini.



### KRITERIA RESPONDEN

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut.

4. Pengguna Anggran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan bendahara seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
5. Kepala bagian, kelompok substansi pengelolaan barang dan jasa, kelompok substansi pembinaan pengadaan barang dan jasa, kelompok substansi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pejabat pengadaan/pokja pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta
6. Auditor dan pengawas Inspektorat Kota Yogyakarta

### **IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Pendidikan :  SMA/SMK/Sederajat  Pendidikan  
Diploma

S1  S2

S3  Lainnya

Latar Belakang Pendidikan :  Akuntansi  Manajemen

Ekonomi  Hukum

Teknik Sipil  Lainnya

Nama OPD Tempat Bekerja :

Jabatan :

Lama Bekerja :  1-5 Tahun  6-10 Tahun

11-15 Tahun  >15 Tahun

### **PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai atau yang mendekati dengan keadaan sebenarnya menurut Bapak/Ibu/Saudara untuk setiap pertanyaan.
2. Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan tanda centang (✓) pada salah satu kolom yang tersedia sesuai dengan keterangan sebagai berikut.

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

## DAFTAR PERTANYAAN

### 1. Pertanyaan Variabel *E-Procurement*

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Efisien</b>						
1	Suatu barang/jasa yang diperoleh merupakan barang/jasa yang benar-benar diperlukan oleh instansi pemerintahan atau kebutuhan masyarakat					
2	Suatu barang/jasa yang diperoleh telah memenuhi standar dengan harga yang wajar melalui evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran					
<b>Efektif</b>						
3	Suatu barang/jasa yang diperoleh memiliki kualitas terbaik					
4	Penyedia barang/jasa menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati					
5	Jumlah barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam kontrak					
<b>Terbuka dan bersaing</b>						
6	Proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta					
7	Proses pengadaan barang/jasa memberikan kesempatan bagi seluruh calon peserta untuk bersaing secara kompetitif					
<b>Transparan</b>						
8	Peraturan/kebijakan/aturan dan administrasi/prosedur diinformasikan secara transparan kepada seluruh calon peserta					

9	Persyaratan yang diperlukan seluruh calon peserta untuk melakukan penawaran dibuat secara transparan					
10	Kriteria, tata cara evaluasi, dan tata cara penentuan pemenang bersifat transparan terhadap seluruh calon peserta					
	<b>Adil</b>					
11	Seluruh peserta diperlakukan secara adil dan tidak memihak					
12	Seluruh pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa menolak imbalan dalam bentuk apapun					
	<b>Akuntabel</b>					
13	Arsip dan pencatatan tersedia dalam setiap proses pengadaan barang/jasa					
14	Sistem pengawasan terhadap aturan yang diberlakukan dalam proses pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik					
15	Mekanisme untuk mengevaluasi, meninjau, dan mengambil tindakan terhadap protes atau keluhan oleh peserta dilaksanakan dengan baik					

## 2. Pertanyaan Variabel Sistem Pengendalian Internal

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	<b>Lingkungan pengendalian</b>					
1	Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan integritas tinggi dan sesuai dengan nilai etika yang berlaku					
2	Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan patuh terhadap prosedur yang berlaku					

3	Pimpinan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa					
	<b>Penilaian Risiko</b>					
4	Proses identifikasi risiko dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pihak yang terkait					
5	Proses analisis risiko dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara sistematis dan mendalam					
	<b>Kegiatan pengendalian</b>					
6	Seluruh SDM yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa rutin mendapatkan pembinaan dan pelatihan					
7	Pengelolaan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa memiliki pengendalian yang memadai					
	<b>Komunikasi dan informasi</b>					
8	Sarana komunikasi dalam pengadaan barang/jasa telah efektif digunakan untuk memastikan koordinasi antar pihak yang terkait					
9	Komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses pengadaan barang/jasa didasarkan pada tindakan positif dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku					
	<b>Pemantauan</b>					

10	Proses pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dilakukan dengan baik						
----	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Pertanyaan Variabel *Whistleblowing System*

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Struktural</b>						
1	Saya berkomitmen melaksanakan <i>whistleblowing system</i> untuk melaporkan terjadinya pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa					
2	Terdapat kebijakan yang jelas dan efektif untuk melindungi pelapor dalam <i>whistleblowing system</i>					
3	Struktur pengelolaan <i>whistleblowing system</i> telah dikelola dengan baik					
4	<i>Whistleblowing system</i> dijalankan oleh pengelola sesuai prosedur dan fasilitas yang memadai					
<b>Operasional</b>						
5	Terdapat saluran khusus yang aman untuk pelaporan pelanggaran					
6	Proses pelaporan pelanggaran dapat diakses dengan mudah					
<b>Perawatan</b>						
7	Pegawai secara rutin diberikan pelatihan terkait penerapan <i>whistleblowing system</i>					
8	Pegawai mengetahui secara jelas mengenai prosedur dan pentingnya <i>whistleblowing system</i>					

### 4. Pertanyaan Variabel Komitmen Organisasi

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
----	------------	-----	----	---	---	----

	<b>Komitmen afektif</b>					
1	Saya merasa memiliki keterikatan emosional dalam melakukan pekerjaan					
2	Saya merasa terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
<b>Komitmen berkelanjutan</b>						
3	Saya merasa terdapat keterbatasan alternatif pekerjaan selain pekerjaan saya saat ini					
<b>Komitmen normatif</b>						
4	Saya merasa bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku					
5	Saya memiliki kesadaran yang tinggi terkait komitmen pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa					

### 5. Pertanyaan Variabel Integritas

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Inti</b>						
1	Saya bersikap jujur dan transparan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
2	Saya bertanggung jawab terhadap setiap tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
3	Saya disiplin terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
<b>Etos kerja</b>						
4	Saya bekerja secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain atas tugas yang menjadi tanggung jawab saya					

5	Saya bekerja keras terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar berjalan secara lancar dan sesuai prosedur yang berlaku					
6	Saya bersikap sederhana dan tidak berlebihan atas pekerjaan yang saya miliki					
<b>Sikap</b>						
7	Saya memiliki sikap berani atas risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
8	Saya peduli terhadap kesulitan yang dialami setiap pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
9	Saya bersikap adil dan tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan barang/jasa					

## 6. Pertanyaan Variabel Pencegahan *Fraud*

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Memperkuat kerangka hukum</b>						
1	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku					
2	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa					
<b>Prosedur yang transparan</b>						
3	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan					
<b>Membuka dokumen tender</b>						
4	Pelaksanaan tender pada pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan					
<b>Evaluasi penawaran</b>						
5	Proses evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara adil					

6	Keputusan pemenang tender tidak berpihak pada penyedia tertentu					
	<b>Melimpahkan wewenang</b>					
7	Audit independen yang dilakukan dapat mengungkap adanya manipulasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa					
8	Wewenang atas persetujuan kontrak pengadaan barang/jasa hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki wewenang					
	<b>Pemeriksaan dan audit independen</b>					
9	Audit independen memiliki peran penting dalam memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan					

### Lampiran 3 Jawaban Kuesioner

<i>E-Procurement (X1)</i>															<b>TOTAL</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>Efisien</b>		<b>Efektif</b>			<b>Terbuka dan Bersaing</b>		<b>Transparan</b>			<b>Adil</b>		<b>Akuntabel</b>				
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15		
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73	4,87
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	68	4,53
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73	4,87
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	4,07
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	68	4,53
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71	4,73
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72	4,80
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74	4,93
5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	67	4,47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	68	4,53
5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,27
5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4,33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	70	4,67
5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	71	4,73
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	73	4,87
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	66	4,40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72	4,80
4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	65	4,33



<i>E-Procurement (X1)</i>															<b>TOTAL</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>Efisien</b>		<b>Efektif</b>			<b>Terbuka dan Bersaing</b>		<b>Transparan</b>			<b>Adil</b>		<b>Akuntabel</b>				
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	68	4,53
5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	65	4,33
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74	4,93
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,93
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3,87
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	72	4,80
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73	4,87
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	72	4,80
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	73	4,87
5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	71	4,73
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	68	4,53
5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	64	4,27
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	63	4,20
5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4,33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	71	4,73
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	66	4,40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69	4,60
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5,00
5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	65	4,33
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	67	4,47
5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	71	4,73
5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	70	4,67
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	65	4,33





Sistem Pengendalian Internal (X2)									<b>TOTAL</b>	<b>Rata-rata</b>
Lingkungan Pengendalian			Penilaian Risiko		Kegiatan Pengendalian		Komunikasi dan Informasi		Pemantauan	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	43	4,3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
5	5	5	5	4	4	5	5	5	47	4,7
5	5	5	5	5	4	4	4	5	47	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
3	3	3	3	3	3	4	3	3	32	3,2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	4,1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
5	5	5	4	4	4	4	5	5	46	4,6
4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
4	5	5	4	3	3	5	4	4	41	4,1
5	5	4	4	4	4	4	4	4	42	4,2
5	5	5	5	5	4	4	4	4	45	4,5
4	4	4	4	4	4	3	4	4	39	3,9
4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
5	5	5	4	4	4	4	4	4	43	4,3
5	4	4	4	4	5	4	5	4	43	4,3
5	5	5	4	4	3	5	5	5	46	4,6
4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4
4	4	5	4	4	4	4	5	4	42	4,2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
5	5	5	5	4	4	4	5	5	47	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
5	5	5	4	4	4	5	5	5	47	4,7
4	4	4	4	5	5	5	5	5	46	4,6
5	5	5	5	5	4	4	5	5	47	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5
4	4	4	4	3	3	5	4	4	39	3,9
4	4	4	5	4	4	4	4	5	43	4,3
5	5	5	4	4	4	4	5	5	46	4,6
5	5	5	4	4	4	4	4	5	44	4,4





<i>Whistleblowing System (X3)</i>								<b>Total</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>Struktural</b>				<b>Operasional</b>		<b>Perawatan</b>			
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	5	4	4	5	5	5	5	38	4,75
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	4	5	5	5	5	3	3	35	4,38
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	4	4	3	3	30	3,75
5	5	4	5	5	5	4	5	38	4,75
5	5	5	5	5	5	4	4	38	4,75
4	5	5	5	5	5	3	4	36	4,50
4	4	4	4	5	4	4	4	33	4,13
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
4	5	5	5	5	4	5	5	38	4,75
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	4	3	3	3	3	3	3	26	3,25
4	4	4	4	4	4	3	4	31	3,88
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	4	4	4	5	4	4	4	34	4,25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
3	3	3	3	3	3	3	3	24	3,00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	3	3	3	3	28	3,50
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	4	4	3	4	31	3,88
4	4	4	4	4	4	3	3	30	3,75
4	4	4	4	4	3	4	3	30	3,75

Whistleblowing System (X3)								Total	Rata-rata
Struktural				Operasional		Perawatan			
4	4	5	4	5	4	4	4	34	4,25
4	4	4	4	4	5	5	5	35	4,38
5	4	3	4	5	5	5	5	36	4,50
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	5	5	3	3	4	4	4	33	4,13
5	5	5	5	5	5	4	4	38	4,75
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	5	5	4	4	5	5	5	38	4,75
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	5	5	5	5	4	4	4	37	4,63
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
5	5	4	3	5	5	5	5	37	4,63
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	5	5	3	4	4	4	4	34	4,25
5	5	5	5	5	5	5	4	39	4,88
5	5	5	5	5	5	5	5	39	5,00
5	5	5	5	5	5	4	4	38	4,75
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	4	5	4	5	4	5	5	36	4,50
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	4	4	4	4	4	4	4	33	4,13
5	5	5	4	3	3	4	4	33	4,13
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
5	5	5	5	5	4	4	4	37	4,63
5	4	5	5	5	4	3	5	36	4,50
4	5	5	5	5	4	4	4	36	4,50
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	4	4	4	5	5	5	5	37	4,63
5	4	3	4	5	5	5	5	36	4,50
4	4	3	4	3	4	3	3	28	3,50

Komitmen Organisasi (X4)					Total	Rata-rata			
Komitmen Afektif	Komitmen Berkelanjutan	Komitmen Normatif	KO1	KO2	KO3	KO4	KO5		
5	4	3	4	4	20	4			
4	3	4	4	4	19	3,8			
4	4	3	4	4	19	3,8			
4	4	4	5	5	22	4,4			
5	5	5	5	5	25	5			
5	5	5	5	5	25	5			
4	4	4	4	4	20	4			
4	5	3	5	5	22	4,4			
4	5	5	5	5	24	4,8			
4	4	4	4	5	21	4,2			
5	4	4	5	5	23	4,6			
4	4	4	4	4	20	4			
3	3	3	4	5	18	3,6			
4	4	4	4	4	20	4			
5	4	5	4	4	22	4,4			
5	5	5	5	5	25	5			
4	3	3	4	4	18	3,6			
4	4	4	4	5	21	4,2			
4	4	4	4	4	20	4			
4	4	4	4	4	20	4			
4	4	3	4	4	19	3,8			
4	4	3	4	4	19	3,8			
4	4	4	4	4	20	4			
5	5	5	5	5	25	5			
4	5	3	5	5	22	4,4			
4	4	4	4	4	20	4			
4	3	3	4	4	18	3,6			
4	4	4	4	4	20	4			
4	4	4	4	5	21	4,2			
4	4	4	4	4	20	4			
5	5	5	5	5	25	5			
4	3	3	4	4	18	3,6			
4	4	4	4	4	20	4			
4	4	4	4	5	21	4,2			
4	4	4	4	4	20	4			
5	5	5	5	5	25	5			
4	3	3	4	4	18	3,6			

Komitmen Organisasi (X4)					Total	Rata-rata
Komitmen Afektif	Komitmen Berkelanjutan	Komitmen Normatif				
5	5	4	5	5	24	4,8
4	4	4	4	5	21	4,2
4	4	4	4	4	20	4
4	4	3	4	4	19	3,8
4	4	4	4	4	20	4
4	4	3	4	4	19	3,8
4	4	5	4	4	21	4,2
4	4	4	4	4	20	4
4	4	4	4	4	20	4
4	4	3	4	5	20	4
4	4	3	4	4	19	3,8
5	5	5	5	5	25	5
4	4	4	5	5	22	4,4
3	3	3	3	3	15	3
5	3	3	5	5	21	4,2
3	3	3	3	3	15	3
3	3	3	3	4	16	3,2
4	4	3	5	4	20	4
4	3	4	3	4	18	3,6
4	3	2	4	4	17	3,4
4	4	4	4	5	21	4,2
5	5	4	5	5	24	4,8
5	4	2	5	5	21	4,2
3	4	3	4	4	18	3,6
5	5	5	5	5	25	5
4	3	3	4	4	18	3,6
4	4	3	4	4	19	3,8
4	4	4	4	4	20	4
3	3	4	4	4	18	3,6
5	5	3	5	5	23	4,6
4	4	4	4	4	20	4
4	4	4	4	4	20	4
4	4	3	5	5	21	4,2
4	4	4	4	4	20	4

Komitmen Organisasi (X4)					Total	Rata-rata
Komitmen Afektif	Komitmen Berkelanjutan	Komitmen Normatif				
5	5	4	5	4	23	4,6
3	4	4	4	4	19	3,8
4	3	3	4	4	18	3,6
5	5	4	4	4	22	4,4
4	4	4	4	4	20	4
5	4	1	5	5	20	4
3	3	4	4	4	18	3,6
4	4	4	4	4	20	4
5	4	4	4	5	22	4,4
5	3	5	5	5	23	4,6
5	5	5	5	5	25	5
5	5	4	5	5	24	4,8
4	4	4	4	4	20	4
5	5	5	5	5	25	5
5	5	4	4	4	22	4,4
5	5	5	5	5	25	5
4	4	4	4	4	20	4
4	4	4	4	4	20	4
5	5	4	4	5	23	4,6
4	5	4	5	5	23	4,6
5	5	4	4	5	23	4,6
5	5	5	5	5	25	5
4	4	4	5	5	22	4,4
4	4	4	4	5	21	4,2
5	5	5	5	5	25	5
4	4	3	4	4	19	3,8
5	5	5	5	5	25	5
5	5	5	5	4	24	4,8
5	4	4	4	4	21	4,2
4	4	4	5	5	22	4,4
5	5	5	5	5	25	5
5	5	5	4	4	23	4,6
5	5	5	5	5	25	5
5	5	4	4	5	23	4,6

Komitmen Organisasi (X4)					Total	Rata-rata
Komitmen Afektif	Komitmen Berkelanjutan	Komitmen Normatif				
4	4	4	5	5	22	4,4
5	3	3	5	5	21	4,2
4	4	4	4	4	20	4
5	5	5	5	4	24	4,8
5	5	3	5	5	23	4,6
4	3	3	4	4	18	3,6

Integritas (X5)										Total	Rata-rata
Inti			Etos Kerja			Sikap					
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	38	4,2
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4,1
5	5	4	4	4	4	4	4	5	39	4,3	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4,3	
5	5	5	3	4	4	4	4	4	38	4,2	
5	5	5	4	4	5	4	4	4	40	4,4	
4	4	4	4	4	4	5	5	4	38	4,2	
5	5	5	5	5	5	4	5	5	44	4,9	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
4	4	5	3	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	3	4	5	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	4	5	4	4	5	4	4	4	39	4,3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4,3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	4	4	4	4	5	4	4	4	38	4,2	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4,7	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,9	
5	3	3	3	4	5	4	4	4	35	3,9	
4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3,8	
4	4	4	3	3	3	3	3	4	31	3,4	
5	4	5	5	4	5	4	5	5	42	4,7	
3	4	5	4	5	4	3	3	3	34	3,8	
4	3	3	3	3	4	3	4	4	31	3,4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	5	5	3	5	5	43	4,8	

Integritas (X5)										Total	Rata-rata
Inti			Etos Kerja			Sikap					
5	5	5	5	4	5	5	5	4	43	4,8	
5	5	5	5	5	4	4	4	5	42	4,7	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	3	4	4	4	3	4	34	3,8	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	4	5	4	4	5	4	4	5	40	4,4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	4	4	4	4	5	5	4	38	4,2	
4	4	4	4	4	4	2	4	4	34	3,8	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4,3	
4	4	3	4	5	4	4	3	4	35	3,9	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3,9	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	4	4	4	4	5	5	4	40	4,4	
5	5	5	5	5	5	3	4	5	42	4,7	
4	3	4	4	4	3	3	4	4	33	3,7	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,9	
5	4	4	4	4	4	4	4	5	38	4,2	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	4,6	
5	5	5	4	4	4	5	5	5	42	4,7	
5	4	4	4	3	4	3	4	4	35	3,9	
5	5	5	5	5	5	4	5	4	43	4,8	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	4	4	4	4	4	40	4,4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	5	5	4	4	4	4	5	5	41	4,6	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4,3	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
4	4	4	4	5	5	4	4	4	38	4,2	

Integritas (X5)										Total	Rata-rata
Inti			Etos Kerja			Sikap					
5	5	5	4	4	4	4	4	5	40	4,4	
4	4	4	5	5	4	4	4	5	39	4,3	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	5	3	4	4	4	4	39	4,3	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	4	4	4	4	3	3	4	4	35	3,9	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	4	4	4	3	4	5	5	39	4,3	
4	4	5	3	4	4	4	4	4	36	4,0	
5	5	5	4	4	4	4	4	5	40	4,4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
5	5	5	4	4	4	5	5	5	42	4,7	
5	5	4	5	5	4	5	5	4	42	4,7	
4	5	5	4	4	4	5	5	5	41	4,6	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0	
4	4	3	4	5	4	4	3	4	35	3,9	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,9	

Pencegahan Fraud (Y)									Total	Rata-rata
Memperkuat Kerangka Hukum		Prosedur yang Transparan	Membuka Dokumen Tender	Evaluasi Penawaran		Melimpahkan Wewenang		Pemeriksaan dan Audit Independen		
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	4,2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	5	5	4	4	5	5	5	5	42	4,7
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	5	5	5	5	5	5	42	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	4	5	4	43	4,8
5	5	5	5	5	5	4	5	5	44	4,9
4	5	5	5	5	5	4	3	4	40	4,4
5	4	5	4	4	4	5	5	5	41	4,6
4	5	4	5	4	5	4	4	5	40	4,4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	3	4	4	4	4	4	35	3,9

Pencegahan Fraud (Y)								Total	Rata-rata	
Memperkuat Kerangka Hukum	Prosedur yang Transparan	Membuka Dokumen Tender	Evaluasi Penawaran	Melimpahkan Wewenang	Pemeriksaan dan Audit Independen					
5	4	5	4	4	4	4	5	4	39	4,3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	4	4	4	4	4	40	4,4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	5	5	4	4	4	4	38	4,2
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38	4,2
4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	4,1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	5	4	37	4,1
4	4	4	5	5	4	5	4	4	39	4,3

Pencegahan Fraud (Y)								Total	Rata-rata
Memperkuat Kerangka Hukum	Prosedur yang Transparan	Membuka Dokumen Tender	Evaluasi Penawaran	Melimpahkan Wewenang	Pemeriksaan dan Audit Independen				
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	5	5	5	5	5	42	4,7
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	5	5	4	4	5	4	4	39	4,3
4	5	5	4	4	5	4	4	39	4,3
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	3	4	4	4	4	35	3,9
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	5	4	4	4	5	5	4	40	4,4
4	4	4	5	5	4	4	5	39	4,3
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	4	5	5	5	43	4,8

Pencegahan Fraud (Y)								Total	Rata-rata
Memperkuat Kerangka Hukum	Prosedur yang Transparan	Membuka Dokumen Tender	Evaluasi Penawaran	Melimpahkan Wewenang	Pemeriksaan dan Audit Independen				
5	5	5	4	5	5	5	5	44	4,9
5	5	5	5	5	5	3	5	42	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	3	3	3	3	3	3	3	29	3,2
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	3	5	41	4,6
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	4	5	4	4	41	4,6
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	3	4	4	4	4	35	3,9
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	5	5	5	5	5	5	43	4,8
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	3	5	41	4,6
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0

Pencegahan Fraud (Y)								Total	Rata-rata
Memperkuat Kerangka Hukum	Prosedur yang Transparan	Membuka Dokumen Tender	Evaluasi Penawaran	Melimpahkan Wewenang	Pemeriksaan dan Audit Independen				
5	5	5	4	5	5	5	5	44	4,9
5	4	5	4	4	4	5	4	39	4,3
4	4	4	5	5	5	5	5	42	4,7
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	4	5	5	5	5	5	44	4,9
4	4	4	4	4	5	5	5	40	4,4
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	4	4	42	4,7
4	4	4	5	5	4	4	4	38	4,2
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
4	4	4	5	5	4	4	5	39	4,3
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	4	4	4	4	4	4	4	37	4,1
5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0

Pencegahan Fraud (Y)									Total	Rata-rata
Memperkuat Kerangka Hukum	Prosedur yang Transparan	Membuka Dokumen Tender	Evaluasi Penawaran	Melimpahkan Wewenang	Pemeriksaan dan Audit Independen					
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	4	4	43	4,8
5	5	5	5	4	4	4	4	4	40	4,4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	4,6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	4	4	5	4	5	4	4	5	40	4,4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,0
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,0

## Lampiran 4 Uji Validitas *E-Procurement*

**Correlations**

		EP_1	EP_2	EP_3	EP_4	EP_5	EP_6	EP_7	EP_8	EP_9	EP_10	EP_11	EP_12	EP_13	EP_14	EP_15	TOTAL
EP_1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	1	.730** .000	.533** .000	.501** .000	.605** .000	.682** .000	.602** .000	.564** .000	.535** .000	.441** .000	.514** .000	.446** .000	.391** .000	.382** .000	.315** .001	.715** .000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.730** .000	1	.598** .000	.499** .000	.587** .000	.553** .000	.630** .000	.555** .000	.515** .000	.403** .000	.421** .000	.483** .000	.370** .000	.315** .001	.316** .001	.693** .000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.533** .000	.598** .000	1	.525** .000	.449** .000	.520** .000	.498** .000	.366** .000	.443** .000	.449** .000	.465** .000	.410** .000	.502** .000	.505** .000	.465** .000	.678** .000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.501** .000	.499** .000	.525** .000	1	.731** .000	.506** .000	.613** .000	.578** .000	.536** .000	.495** .000	.623** .000	.687** .000	.532** .000	.479** .000	.412** .000	.762** .000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.605** .000	.587** .000	.449** .000	.731** .000	1	.693** .000	.694** .000	.658** .000	.622** .000	.556** .000	.675** .000	.695** .000	.583** .000	.464** .000	.397** .000	.818** .000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_6	Pearson Correlation	.682**	.553**	.520**	.506**	.693**	1	.775**	.624**	.588**	.485**	.644**	.397**	.442**	.356**	.323**	.745**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	107	107	107	107	107	107		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.602**	.630**	.498**	.613**	.694**	.775**	1	.773**	.740**	.565**	.682**	.545**	.552**	.395**	.399**	.821**	
	N	107	107	107	107	107	107		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.564**	.555**	.366**	.578**	.658**	.624**	.773**	1	.815**	.678**	.682**	.545**	.624**	.467**	.436**	.811**	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.535**	.515**	.443**	.536**	.622**	.588**	.740**	.815**	1	.744**	.645**	.553**	.622**	.426**	.500**	.805**	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.441**	.403**	.449**	.495**	.556**	.485**	.565**	.678**	.744**	1	.802**	.685**	.697**	.567**	.565**	.792**	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.514**	.421**	.465**	.623**	.675**	.644**	.682**	.682**	.645**	.802**	1	.759**	.785**	.662**	.592**	.864**	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.446**	.483**	.410**	.687**	.695**	.397**	.545**	.545**	.553**	.685**	.759**	1	.736**	.581**	.550**	.789**	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
EP_13	Pearson Correlation	.391**	.370**	.502**	.532**	.583**	.442**	.552**	.624**	.622**	.697**	.785**	.736**	1	.740**	.673**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
EP_14	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	Pearson Correlation	.382**	.315**	.505**	.479**	.464**	.356**	.395**	.467**	.426**	.567**	.662**	.581**	.740**	1	.896**	.719**
EP_15	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.315**	.316**	.465**	.412**	.397**	.323**	.399**	.436**	.500**	.565**	.592**	.550**	.673**	.896**	1	.684**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 5 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

Correlations

		SPI_1	SPI_2	SPI_3	SPI_4	SPI_5	SPI_6	SPI_7	SPI_8	SPI_9	SPI_10	TOTAL
SPI_1	Pearson Correlation	1	.913**	.724**	.550**	.453**	.447**	.382**	.552**	.470**	.467**	.783**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_2	Pearson Correlation	.913**	1	.743**	.503**	.409**	.344**	.405**	.504**	.490**	.488**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_3	Pearson Correlation	.724**	.743**	1	.563**	.453**	.314**	.434**	.513**	.566**	.532**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_4	Pearson Correlation	.550**	.503**	.563**	1	.733**	.582**	.528**	.513**	.628**	.600**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_5	Pearson Correlation	.453**	.409**	.453**	.733**	1	.749**	.552**	.533**	.571**	.435**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_6	Pearson Correlation	.447**	.344**	.314**	.582**	.749**	1	.517**	.541**	.447**	.389**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_7	Pearson Correlation	.382**	.405**	.434**	.528**	.552**	.517**	1	.564**	.540**	.470**	.707**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_8	Pearson Correlation	.552**	.504**	.513**	.513**	.533**	.541**	.564**	1	.662**	.493**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_9	Pearson Correlation	.470**	.490**	.566**	.628**	.571**	.447**	.540**	.662**	1	.690**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
SPI_10	Pearson Correlation	.467**	.488**	.532**	.600**	.435**	.389**	.470**	.493**	.690**	1	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.783**	.761**	.765**	.814**	.776**	.707**	.707**	.774**	.795**	.727**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Lampiran 6 Uji Validitas Whistleblowing System**

**Correlations**

		WS_1	WS_2	WS_3	WS_4	WS_5	WS_6	WS_7	WS_8	TOTAL
WS_1	Pearson Correlation	1	.745**	.640**	.567**	.660**	.597**	.541**	.586**	.816**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
WS_2	Pearson Correlation	.745**	1	.772**	.689**	.639**	.570**	.581**	.606**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
WS_3	Pearson Correlation	.640**	.772**	1	.727**	.586**	.404**	.447**	.491**	.771**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
WS_4	Pearson Correlation	.567**	.689**	.727**	1	.714**	.545**	.422**	.491**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
WS_5	Pearson Correlation	.660**	.639**	.586**	.714**	1	.737**	.581**	.677**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107

WS_6	Pearson Correlation	.597**	.570**	.404**	.545**	.737**	1	.608**	.637**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
WS_7	Pearson Correlation	.541**	.581**	.447**	.422**	.581**	.608**	1	.853**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
WS_8	Pearson Correlation	.586**	.606**	.491**	.491**	.677**	.637**	.853**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.816**	.853**	.771**	.785**	.863**	.790**	.786**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Lampiran 7 Uji Validitas Komitmen Organisasi

**Correlations**

		KO_1	KO_2	KO_3	KO_4	KO_5	TOTAL
KO_1	Pearson Correlation	1	.641**	.380**	.619**	.521**	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107
KO_2	Pearson Correlation	.641**	1	.527**	.581**	.483**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107
KO_3	Pearson Correlation	.380**	.527**	1	.298**	.246*	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.011	.000
	N	107	107	107	107	107	107
KO_4	Pearson Correlation	.619**	.581**	.298**	1	.726**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002		.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107
KO_5	Pearson Correlation	.521**	.483**	.246*	.726**	1	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.000		.000
	N	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.805**	.847**	.688**	.798**	.728**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 8 Uji Validitas Integritas

**Correlations**

		IN_1	IN_2	IN_3	IN_4	IN_5	IN_6	IN_7	IN_8	IN_9	TOTAL
IN_1	Pearson Correlation	1	.701**	.597**	.481**	.286**	.447**	.364**	.510**	.573**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_2	Pearson Correlation	.701**	1	.768**	.615**	.415**	.395**	.519**	.545**	.569**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_3	Pearson Correlation	.597**	.768**	1	.551**	.366**	.497**	.400**	.525**	.510**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_4	Pearson Correlation	.481**	.615**	.551**	1	.595**	.549**	.451**	.605**	.526**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_5	Pearson Correlation	.286**	.415**	.366**	.595**	1	.615**	.446**	.460**	.534**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000

	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_6	Pearson Correlation	.447**	.395**	.497**	.549**	.615**	1	.481**	.516**	.486**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_7	Pearson Correlation	.364**	.519**	.400**	.451**	.446**	.481**	1	.674**	.479**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_8	Pearson Correlation	.510**	.545**	.525**	.605**	.460**	.516**	.674**	1	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
IN_9	Pearson Correlation	.573**	.569**	.510**	.526**	.534**	.486**	.479**	.624**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.720**	.813**	.766**	.796**	.692**	.730**	.716**	.804**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Lampiran 9 Uji Validitas Pencegahan Fraud**

Correlations											
		PF_1	PF_2	PF_3	PF_4	PF_5	PF_6	PF_7	PF_8	PF_9	TOTAL
PF_1 Pearson Correlation		1	.784**	.802**	.632**	.568**	.586**	.440**	.602**	.469**	.795**
Sig. (2-tailed)			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_2 Pearson Correlation		.784**	1	.844**	.672**	.618**	.774**	.457**	.547**	.486**	.836**
Sig. (2-tailed)		.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_3 Pearson Correlation		.802**	.844**	1	.656**	.635**	.722**	.502**	.631**	.466**	.847**
Sig. (2-tailed)		.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_4 Pearson Correlation		.632**	.672**	.656**	1	.799**	.689**	.457**	.604**	.486**	.817**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_5 Pearson Correlation		.568**	.618**	.635**	.799**	1	.775**	.548**	.714**	.549**	.844**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000

	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_6	Pearson Correlation	.586**	.774**	.722**	.689**	.775**	1	.571**	.666**	.676**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_7	Pearson Correlation	.440**	.457**	.502**	.457**	.548**	.571**	1	.635**	.846**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_8	Pearson Correlation	.602**	.547**	.631**	.604**	.714**	.666**	.635**	1	.676**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
PF_9	Pearson Correlation	.469**	.486**	.466**	.486**	.549**	.676**	.846**	.676**	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL	Pearson Correlation	.795**	.836**	.847**	.817**	.844**	.877**	.746**	.827**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 10 Uji Reliabilitas

### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.949	15

### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.919	10

### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.925	8

### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	5

### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.906	9

### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	9

### Lampiran 11 Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant )	1.853	2.830		.655	.514		
	EP	.081	.054	.122	1.493	.139	.483	2.071
	SPI	.235	.096	.238	2.462	.016	.342	2.921
	WSB	.122	.074	.124	1.655	.101	.568	1.762
	KO	.460	.134	.285	3.437	.001	.467	2.139
	IN	.224	.084	.219	2.675	.009	.480	2.085

a. Dependent Variable: PF

### Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.208	1.747		-.119	.905
	EP	.061	.033	.255	1.835	.069
	SPI	-.070	.059	-.197	-1.194	.235
	WSB	.031	.046	.086	.673	.502
	KO	.097	.083	.166	1.173	.243
	IN	-.056	.052	-.152	-1.091	.278

a. Dependent Variable: ABS\_RESIDUAL

### Lampiran 13 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.204	.315		.649	.518
	EP	.135	.090	.122	1.495	.138
	SPI	.261	.106	.238	2.455	.016
	WSB	.108	.066	.124	1.639	.104
	KO	.255	.074	.285	3.435	.001
	IN	.225	.084	.220	2.689	.008

a. Dependent Variable: PF

### Lampiran 14 Distribusi Frekuensi *E-Procurement*

EP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	45	42.1	42.1	42.1
Sangat Setuju	62	57.9	57.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

EP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	54	50.5	50.5	50.5
Sangat Setuju	53	49.5	49.5	100.0
Total	107	100.0	100.0	

EP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	5	4.7	4.7	4.7
Setuju	59	55.1	55.1	59.8
Sangat Setuju	43	40.2	40.2	100.0
Total	107	100.0	100.0	

EP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	3	2.8	2.8	2.8
Setuju	52	48.6	48.6	51.4
Sangat Setuju	52	48.6	48.6	100.0
Total	107	100.0	100.0	

EP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	49	45.8	45.8	46.7
Sangat Setuju	57	53.3	53.3	100.0
Total	107	100.0	100.0	

EP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	50	46.7	46.7	46.7
Sangat Setuju	57	53.3	53.3	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	48	44.9	44.9	44.9
Sangat Setuju	59	55.1	55.1	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	48	44.9	44.9	44.9
Sangat Setuju	59	55.1	55.1	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	52	48.6	48.6	48.6
Sangat Setuju	55	51.4	51.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	58	54.2	54.2	54.2
Sangat Setuju	49	45.8	45.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP11**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	51	47.7	47.7	47.7
Sangat Setuju	56	52.3	52.3	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP12**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	46	43.0	43.0	43.0
Sangat Setuju	61	57.0	57.0	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP13**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	51	47.7	47.7	48.6
Sangat Setuju	55	51.4	51.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP14**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	54	50.5	50.5	51.4
Sangat Setuju	52	48.6	48.6	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**EP15**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	56	52.3	52.3	53.3
Sangat Setuju	50	46.7	46.7	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**Lampiran 15 Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal****SP1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	49	45.8	45.8	46.7
Sangat Setuju	57	53.3	53.3	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	48	44.9	44.9	45.8
Sangat Setuju	58	54.2	54.2	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	53	49.5	49.5	50.5
Sangat Setuju	53	49.5	49.5	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	1.9	1.9	1.9
Setuju	66	61.7	61.7	63.6
Sangat Setuju	39	36.4	36.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	72	67.3	67.3	71.0
Sangat Setuju	31	29.0	29.0	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	8	7.5	7.5	7.5
Setuju	68	63.6	63.6	71.0
Sangat Setuju	31	29.0	29.0	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	66	61.7	61.7	62.6
Sangat Setuju	40	37.4	37.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	1.9	1.9	1.9
Setuju	54	50.5	50.5	52.3
Sangat Setuju	51	47.7	47.7	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	58	54.2	54.2	55.1
Sangat Setuju	48	44.9	44.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**SP10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	59	55.1	55.1	55.1
Sangat Setuju	48	44.9	44.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

### Lampiran 16 Distribusi Frekuensi *Whistleblowing System*

WS1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	5	4.7	4.7	4.7
Setuju	53	49.5	49.5	54.2
Sangat Setuju	49	45.8	45.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

WS2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	63	58.9	58.9	62.6
Sangat Setuju	40	37.4	37.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

WS3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	9	8.4	8.4	8.4
Setuju	58	54.2	54.2	62.6
Sangat Setuju	40	37.4	37.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

WS4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	8	7.5	7.5	7.5
Setuju	65	60.7	60.7	68.2
Sangat Setuju	34	31.8	31.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

WS5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	10	9.3	9.3	9.3
Setuju	51	47.7	47.7	57.0
Sangat Setuju	46	43.0	43.0	100.0
Total	107	100.0	100.0	

WS6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	9	8.4	8.4	8.4
Setuju	55	51.4	51.4	59.8
Sangat Setuju	42	39.3	39.3	99.1
6.00	1	.9	.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**WS7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	18	16.8	16.8	16.8
Setuju	54	50.5	50.5	67.3
Sangat Setuju	35	32.7	32.7	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**WS8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	14	13.1	13.1	13.1
Setuju	60	56.1	56.1	69.2
Sangat Setuju	33	30.8	30.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

### Lampiran 17 Distribusi Frekuensi Komitmen Organisasi

**KO1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	8	7.5	7.5	7.5
Setuju	60	56.1	56.1	63.6
Sangat Setuju	39	36.4	36.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**KO2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	18	16.8	16.8	16.8
Setuju	56	52.3	52.3	69.2
Sangat Setuju	33	30.8	30.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**KO3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	.9	.9	.9
Tidak Setuju	2	1.9	1.9	2.8
Netral	29	27.1	27.1	29.9
Setuju	53	49.5	49.5	79.4
Sangat Setuju	22	20.6	20.6	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**KO4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	63	58.9	58.9	62.6
Sangat Setuju	40	37.4	37.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**KO5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	1.9	1.9	1.9
Setuju	57	53.3	53.3	55.1
Sangat Setuju	48	44.9	44.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**Lampiran 18 Distribusi Frekuensi Integritas****IN1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	44	41.1	41.1	42.1
Sangat Setuju	62	57.9	57.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**IN2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	53	49.5	49.5	53.3
Sangat Setuju	50	46.7	46.7	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**IN3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	51	47.7	47.7	51.4
Sangat Setuju	52	48.6	48.6	100.0
Total	107	100.0	100.0	

### Lampiran 19 Distribusi Frekuensi Integritas

IN1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	44	41.1	41.1	42.1
Sangat Setuju	62	57.9	57.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	

IN2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	53	49.5	49.5	53.3
Sangat Setuju	50	46.7	46.7	100.0
Total	107	100.0	100.0	

IN3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	51	47.7	47.7	51.4
Sangat Setuju	52	48.6	48.6	100.0
Total	107	100.0	100.0	

IN4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	13	12.1	12.1	12.1
Setuju	61	57.0	57.0	69.2
Sangat Setuju	33	30.8	30.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

IN5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	5	4.7	4.7	4.7
Setuju	68	63.6	63.6	68.2
Sangat Setuju	34	31.8	31.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

IN6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	66	61.7	61.7	65.4
Sangat Setuju	37	34.6	34.6	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**IN7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	.9	.9	.9
Netral	9	8.4	8.4	9.3
Setuju	64	59.8	59.8	69.2
Sangat Setuju	33	30.8	30.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**IN8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	5	4.7	4.7	4.7
Setuju	63	58.9	58.9	63.6
Sangat Setuju	39	36.4	36.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**IN9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	66	61.7	61.7	62.6
Sangat Setuju	40	37.4	37.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**Lampiran 20 Distribusi Frekuensi Pencegahan Fraud****PF1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	53	49.5	49.5	49.5
Sangat Setuju	54	50.5	50.5	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	51	47.7	47.7	48.6
Sangat Setuju	55	51.4	51.4	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	52	48.6	48.6	49.5
Sangat Setuju	54	50.5	50.5	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	46	43.0	43.0	46.7
Sangat Setuju	57	53.3	53.3	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	53	49.5	49.5	50.5
Sangat Setuju	53	49.5	49.5	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	.9	.9	.9
Setuju	50	46.7	46.7	47.7
Sangat Setuju	56	52.3	52.3	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	4	3.7	3.7	3.7
Setuju	54	50.5	50.5	54.2
Sangat Setuju	49	45.8	45.8	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	1.9	1.9	1.9
Setuju	52	48.6	48.6	50.5
Sangat Setuju	53	49.5	49.5	100.0
Total	107	100.0	100.0	

**PF9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	1.9	1.9	1.9
Setuju	58	54.2	54.2	56.1
Sangat Setuju	47	43.9	43.9	100.0
Total	107	100.0	100.0	